

SKRIPSI
EVALUASI PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG



OLEH :

NUR AKHLIA FAJRIN
NIM: 2120203870233029

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2025 M/1446 H

SKRIPSI

**EVALUASI PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**



OLEH :

**NUR AKHLIA FAJRIN
NIM: 2120203870233029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan
Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong
Nama Mahasiswa : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-657/In.39/FUAD.03/PP.00.9/03/2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Nurhakki, S.Sos., M. Si
NIP : 197706162009122001



Mengetahui :



Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. A. N. Kidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan
Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Nama Mahasiswa : Nur Akhlia Fajrin

NIM : 2120203870233029

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-657/In.39/FUAD.03/PP.00.9/03/2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

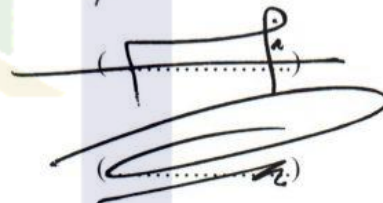
Nurhakki, S.Sos., M. Si

(Ketua)



Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos. I

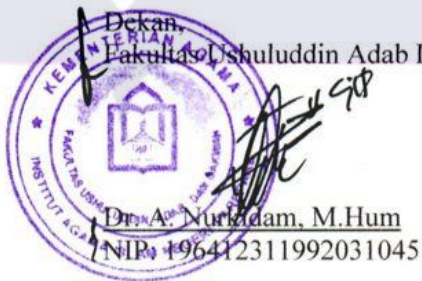
(Anggota)



Fikruzzaman Saleh, M. Sos.

(Anggota)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pintu Surgaku Ibunda St. Hadia S.Pd dan Cinta Pertama dan Panutanku Ayahandaku tercinta Ocrid Rosdita Suhary, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh, dan nasihat yang tiada hentinya diberikan kepada saya dalam menyelesaikan studi ini sampai selesai.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurhakki, S.Sos., M. Si selaku dosen pembimbing utama, karena penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dan banyak memberikan arahan serta masukan serta telah meluangkan

waktu, ilmu serta kesabarannya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Dr. A. Nurkidam, M. Hum Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Nurhakki, S.Sos., M. Si Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos. I selaku penguji I dan Fikruzzaman Saleh, M. Sos. selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan berupa saran dan kritik dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Para dosen Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang telah memberikan izin, dukungan, serta bantuan yang sangat berarti selama pelaksanaan penelitian lapangan. Tanpa bantuan Bapak, proses pengumpulan data tidak akan berjalan dengan lancar.
7. Seluruh masyarakat Lembang Bo'ne Buntu Sisong yang telah dengan hangat menerima penulis selama lima bulan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta memberikan izin, dukungan, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di tengah-tengah masyarakat.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar atas cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah putus selama proses penyusunan karya ini. Kehadiran keluarga sebagai sumber kekuatan

batin, semangat, dan tempat berpulang dalam segala kondisi, menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam perjalanan ini. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan doa yang tulus, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, mulai dari proses awal hingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa restu dan dukungan keluarga, semua pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

9. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ayu Azahra dan Wilda Widayani, yang selalu bersedia menjadi pendengar di saat saya merasa panik. Kepada Harnia, dan Muh. Fadli, atas bantuannya ketika saya mengalami kesulitan dalam penulisan. Untuk Aini Riswan, dan Arianti, yang menjadi sumber energi positif selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman dan Rekan penulis, diantaranya Teman Seposko MBKM yang telah menjadi rekan seperjuangan selama lima bulan penuh, berbagi tawa di tengah lelah dalam segala situasi, dan Rekan-rekan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan yang berarti sepanjang masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Kepada senior saya, Marwan Prajayana, S.Sos., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, motivasi, dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan karya ini.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sepupu saya, Asmirinda Resa, S.Pd., M.Pd., atas segala bantuan, dukungan, dan pendampingannya sejak awal hingga akhir proses penyusunan karya ini.

13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Seseorang yang senantiasa hadir, Chandra Ramadhan, yang telah kebersamai sejak awal proses hingga akhir, dalam segala suka dan lelah, bahkan di tengah dinamika dan drama yang mewarnai perjalanan ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kehadirannya yang tak tergantikan dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir, Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Saya merasa bangga dengan diri saya sendiri karena telah melampaui berbagai rintangan. Untuk versi diriku yang memilih untuk tidak menyerah, meski sempat ragu apakah aku cukup pintar. Ternyata aku tidak hanya cukup, aku luar biasa. *I did it with grace, like a true Swiftie queen.*

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2025 M
22 Dzulhijah 1446 H

Penulis


NUR AKHLIA FAJRIN
NIM : 2120203870233029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Akhlia Fajrin
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203870233029
Tempat/Tanggal Lahir : Kariango/19 September 2003
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Evaluasi Perencanaan Komunikasi
Pengembangan Desa Wisata Lembang
Bo'ne Buntu Sisong

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2025 M
22 Dzulhijah 1446 H

Penulis


NUR AKHLIA FAJRIN
NIM : 2120203870233029

ABSTRAK

NUR AKHLIA FAJRIN, *Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong*. (Dibimbing oleh Nurhakki).

Penelitian ini berfokus menganalisis evaluasi perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Meskipun memiliki potensi wisata alam dan budaya, desa ini menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan pengelolaan.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model Cutlip dan Center menjadi kerangka analisis, meliputi empat tahap: penemuan fakta, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Permasalahan perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, sebagaimana belum berjalan maksimal. Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya struktur pengelola lokal, dokumen perencanaan desa yang tidak memuat arah wisata, Padahal, dalam visi dan misi desa sebenarnya telah tercantum arah pengembangan desa sebagai destinasi wisata berbasis potensi lokal. Namun, arah tersebut belum disambut secara serius oleh kebijakan pemerintah desa maupun lembaga terkait, baik dalam bentuk regulasi, perencanaan teknis, maupun pengorganisasian sumber daya. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara semangat yang tertuang dalam visi-misi dengan implementasi nyata di lapangan. serta minimnya keterlibatan pemuda dan masyarakat sejak awal program. (2). Kolaborasi dalam pengembangan potensi desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, dari sisi pengembangan wisata sempat melibatkan BAZNAS, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, namun tidak terbangun koordinasi yang berkelanjutan karena tidak adanya forum kolaboratif. (3). Hambatan komunikasi muncul dari berbagai sisi, mulai dari sisi komunikator yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan publik, sisi pesan yang disampaikan tidak disampaikan secara merata, hingga sisi media komunikasi yang digunakan belum optimal. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya media komunikasi formal yang dapat menjembatani antara pengelola desa wisata dengan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Hal ini menyebabkan penyampaian informasi tidak merata dan partisipasi kepada publik internal dan eksternal menjadi tidak merata. Temuan ini menekankan pentingnya perencanaan komunikasi, terbuka, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal.

Kata kunci: *Komunikasi Pembangunan, Desa Wisata.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL JUDUL PENELITIAN.....	
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMIS PENGUJI.....	iError! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teoritis.....	16
1. Model Perencanaan Komunikasi	16
2. Teori Perencanaan Pariwisata	28
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Pikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	52
F. Uji Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.....	62
2. Kolaborasi Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.....	82
3. Hambatan Komunikasi Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.....	87
B. Pembahasan Hasil Penelitian	94
1. Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong	95
2. Evaluasi Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong	98
3. Evaluasi Hambatan komunikasi dalam Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong	100
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	xxiii
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul gambar	Halaman
Gambar 1.1	Lokasi Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong	6
Gambar 2.1	Model Perencanaan Komunikasi Berbasis Public Relations oleh Cutlip & Center	20
Gambar 2.2	Bagan Kerangka Pikir	48
Gambar 3.1	Bagan Analisis Matriks Miles dan Huberman	59
Gambar 4.1	Kondisi di Sekitaran Lokasi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong	65
Gambar 6.1	Dokumentasi	XXIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Daftar Tabel	Halaman
3.1	Tabel Informan Penelitian	52



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat izin penelitian dari Kampus	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah Kota	Terlampir
3.	Surat keterangan selesai meneliti	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
6.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir
8.	Riwayat Hidup	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.
Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلاً: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِيّ	Kasrah dan	Ī	i dan

	Ya		garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَم	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aly atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْغُ	: <i>al-nau’</i>

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدون	=	بدون
صلعم	=	ﷺ
ط	=	طبعة
بدون ناشر	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisipliner, dan multidimensi yang melibatkan berbagai bagian masyarakat, seperti bisnis, masyarakat, dan wisatawan. Pembangunan pariwisata tentunya memberikan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat lokal. Penerapan model pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif yang dirasakan masyarakat lokal.¹ Pariwisata merupakan sektor unggulan Indonesia yang menjanjikan pemasukan devisa. Selain letak Indonesia yang strategis, hal ini juga karena Indonesia sedang dalam tahap pengembangan di segala macam aset potensi pariwisata. Peran tersebut akan berdampak pada berbagai bidang, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan pariwisata karena saling berkaitan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.²

Sektor pariwisata merupakan industri yang memberikan dampak sosial, ekonomi dan pengelolaan, pelestarian sumber daya alam dan budaya. Kegiatan pariwisata mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia.³ Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan

¹ Nugroho, Septemuryantoro, and Lewa, "Krings."

² Sarmiadi, Suryani, and Sumiarti, "Community Participation in Tourism Village Development in Tungkal Selatan Village, Pariaman Utara District, Pariaman City."

³ Hermawati and Suhermin, "Competitiveness Modeling and Swot Strategy Analysis for Tourism Industry in East Java."

Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten dan signifikan dari 2015 hingga 2019. Ini memungkinkan sektor ini untuk memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 4,8% dan sebagai yang terdepan. sektor/penyumbang devisa 197 triliun setelah industri kelapa sawit.

Jumlah wisatawan di Indonesia meningkat, baik wisatawan asing maupun nasional. Jumlah wisman Indonesia pada tahun 2022 meningkat secara signifikan, mencapai 251,28% dibandingkan tahun 2021. Jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.145.499 pada Mei 2024, naik 20,11% secara tahunan dan 7,36% secara bulanan (antaranews, 2024). Sebaliknya, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 mencapai 7,52 juta, naik 112,26% dibandingkan dengan 3,54 juta perjalanan pada tahun sebelumnya (BPS, 2024). Menurut statistik, jumlah wisatawan di Sulawesi Selatan (Sulsel), terutama wisman, meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat pada tahun 2023 menjadi 17.360 orang, meningkat dari 5.914 orang pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai 3.252.928 orang.

Salah satu daerah pariwisata yang terkenal dengan keindahan alam, Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang terletak di Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar untuk menjadi Desa Wisata yang menarik. Desa ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan, termasuk hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan pegunungan. Desa ini menawarkan pengalaman wisata alam yang unik bagi pengunjung dengan fasilitas seperti area parkir, jalur trekking, dan lokasi foto yang menarik.

Selain keindahan alamnya, Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong juga kaya akan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Aktivitas masyarakat seperti pertanian dan kerajinan tangan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan lokal. Dengan dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal, desa ini berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi unggulan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan wawancara awal dengan kepala desa Bo'ne Buntu Sisong, mengungkapkan bahwa Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAZ) berperan penting dalam keberlangsungan Desa Wisata. Wisata ini menawarkan pemandangan yang indah dan pengunjung dapat menikmati kopi Tondok Lemo sambil melihat pemandangan sekitar. Desa Wisata ini memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Namun kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha masih sering terlihat tidak selaras dalam pengembangan pariwisata. Hal ini terlihat saat peneliti menanyakan terkait objek wisata yang dapat dikunjungi desa wisata pada masyarakat lokal masih banyak yang belum tau dan hanya menjelaskan seadanya. Kemudian juga ditemukan akses jalan ke lokasi wisata yang belum baik. Sehingga diperlukan perencanaan komunikasi pengembangan yang efektif.

Pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong di Tana Toraja mengalami kendala yang signifikan, terutama dalam hal perencanaan komunikasi yang tidak efektif. Meskipun desa ini sebelumnya telah dibuka sebagai desa wisata dengan dukungan dari Baznas, inisiatif tersebut terhenti tanpa penjelasan yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendukung. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan program wisata, serta minimnya informasi yang disampaikan kepada publik mengenai potensi dan manfaat desa wisata ini.

Dari perspektif perencanaan komunikasi, penting untuk mengevaluasi bagaimana informasi disebarluaskan dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan akses terhadap informasi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menjadi penyebab utama mengapa pengembangan desa wisata ini tidak berkelanjutan. Selain itu, perlu ada sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami visi dan misi pengembangan desa wisata tersebut. Dengan mengidentifikasi letak permasalahan dalam komunikasi ini, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk menghidupkan kembali potensi Bo'ne Buntu Sisong sebagai desa wisata yang menarik dan berkelanjutan di masa depan.

BAZNAS Pusat telah membentuk pola kerja sama yang sinergis dengan berbagai lembaga dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong. Melalui program zakat produktif, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta dukungan dalam pemasaran produk lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan kolaborasi ini, diharapkan potensi wisata dan ekonomi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat langsung bagi warga dan meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata.

Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen BAZNAS untuk mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam pengembangan desa. Melalui

program-program yang menysasar pemberdayaan UMKM dan pengembangan desa wisata, BAZNAS berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, BAZNAS memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan lokal serta mampu memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pengembangan desanya sendiri.

BAZNAS telah menyalurkan dana sebesar Rp.600.000.000 juta secara bertahap dalam tiga kali penyaluran untuk pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong, yang sebelumnya dikenal sebagai ecowisata. Tahun pertama sekitar Rp.250.000.000 juta yang dimana peruntukannya itu untuk rumah produksi kopi. Penyaluran dana ini bertujuan tidak hanya untuk menjadikan desa tersebut sebagai destinasi wisata, tetapi juga untuk menyisipkan elemen edukasi bagi pengunjung yang datang. Dengan dukungan dana ini, diharapkan masyarakat lokal dapat mengembangkan berbagai program edukatif yang memperkenalkan budaya, tradisi, dan potensi alam desa kepada wisatawan, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan visi BAZNAS untuk memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal di kalangan pengunjung. Setelah program berjalan ada dua program yang menjadi tujuan yaitu program pembinaan keagamaan dan penguatan ekonomi.



Gambar 1.1 Lokasi Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong
 Sumber: YouTube – “Tondok Lemo, Desa Bo'ne Buntu Sisong, Makale Selatan, Tana Toraja”

Selain Baznas terdapat pula *Stakeholder* yang berperan dalam keberlangsungan Desa Wisata, diantaranya Pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong menghadapi sejumlah masalah yang signifikan yang menghambat kemajuan dan keberlanjutannya. Salah satu isu utama adalah akses jalan yang masih terbatas, membuat pengunjung kesulitan untuk mencapai lokasi desa. Selain itu, desa ini membutuhkan sosok yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara profesional. Keterbatasan dalam pengelolaan ini juga berkaitan dengan perlunya menyamakan frekuensi antara masyarakat kampung setempat dengan BAZNAS serta lembaga pemberdayaan lainnya, agar semua pihak dapat bekerja sama dalam memajukan desa. Tanpa adanya pemahaman dan kolaborasi yang baik, upaya pengembangan desa wisata ini berisiko mengalami stagnasi.

Di samping itu, konflik internal di antara masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pandangan mengenai prioritas pengembangan dan penggunaan sumber daya sering kali menimbulkan ketegangan di antara warga desa. Hal ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan

pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan. Dengan cara ini, diharapkan konflik dapat diminimalisir dan sinergi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait dapat terjalin dengan baik, sehingga tujuan untuk menjadikan Bo'ne Buntu Sisong sebagai desa wisata yang edukatif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Dalam dunia pariwisata, komunikasi sangat penting dalam penyampaian promosi pariwisata.⁴ Komunikasi juga digunakan untuk menginformasikan destinasi, aksesibilitas, dan sumber daya kepada wisatawan dan seluruh pihak yang terlibat dalam pariwisata, termasuk pembentukan kelembagaan pariwisata. Kegiatan komunikasi pariwisata pengembangan destinasi menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat atau stakeholder.⁵ Dengan meningkatkan dialog dan kolaborasi, desa ini dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengelola sumber daya alam, memperkenalkan budaya lokal, dan menarik pengunjung.⁶ Komunikasi pariwisata adalah aktivitas manusia yang menyampaikan informasi tentang perjalanan ke suatu tempat atau objek wisata yang akan dikunjungi serta perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, menarik minat wisatawan dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu.⁷

⁴ Listiyana Syafitri Daulay, Rahmanita Ginting, Arifin Saleh (2019), *Tourism Communications for The Government, Managers, And Communities In Developing Local Wisdom-Based tourism In Padangsidempuan City*, Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (Lwsa) Volume 2 Issue 3

⁵ Setyaningrum, Rahmanto, and Suparno, "Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di 'Nepal Van Java' Dusun Butuh, Kabupaten Magelang."

⁶ Barbu and Price-kreitz, "Ournal of Environmental Management and Tourism Biannually."

⁷ Tafonao, "PERANAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MAHASISWA."

Allah telah mengajarkan kepada manusia betapa pentingnya melakukan evaluasi untuk merencanakan sesuatu di masa depan agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Hasil evaluasi ini akan menjadi pedoman untuk perencanaan yang dilakukan.

Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat Al-Hasyr 18 diatas mengingatkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan tindakan mereka sebagai persiapan untuk hari esok, yaitu kehidupan setelah mati. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong, pesan ini sangat relevan, karena setiap langkah yang diambil dalam proyek ini harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan. Masyarakat desa perlu merenungkan apa yang telah mereka lakukan dan rencanakan untuk masa depan, memastikan bahwa setiap inisiatif tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan dan budaya lokal.

Pengembangan desa wisata ini seharusnya dilakukan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial dan spiritual sebagai persiapan menghadapi pertanggungjawaban di akhirat. Lebih jauh lagi, ayat ini menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara masyarakat setempat dan Lembaga Pemerintah Desa dalam pengembangan desa. Kerja sama yang baik akan memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan

bersama. Dengan bertakwa kepada Allah dan saling memperhatikan tindakan masing-masing, masyarakat dapat membangun Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong tidak hanya sebagai lokasi wisata, tetapi juga sebagai contoh nyata dari bagaimana nilai-nilai etika dan keagamaan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat.

Evaluasi terhadap perencanaan komunikasi dalam penelitian ini menjadi penting karena komunikasi yang terencana adalah fondasi utama dalam keberhasilan program pengembangan desa wisata. Tanpa adanya evaluasi, kelemahan strategi komunikasi yang telah diterapkan tidak akan teridentifikasi dengan jelas. Dalam konteks pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, evaluasi ini diperlukan untuk menilai apakah proses komunikasi yang dilakukan sudah berjalan secara partisipatif, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi juga membantu memastikan bahwa program tidak hanya berjalan berdasarkan inisiatif sepihak atau asumsi semata, melainkan dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Sebuah program pengembangan idealnya dibangun di atas perencanaan komunikasi yang matang, sehingga urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meninjau kembali dan memperbaiki pola komunikasi yang digunakan agar lebih adaptif, terukur, dan kontekstual sesuai dengan tantangan nyata di lapangan.

Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pengunjung, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat setempat di dunia dan akhirat, dengan demikian Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan di atas penting kiranya untuk menggali bagaimana Perencanaan Komunikasi dalam Pengembangan Desa Wisata Buntu Sisong.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul "Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran fakta permasalahan dalam perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
2. Bagaimana kolaborasi dalam pengembangan potensi desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
3. Bagaimana hambatan komunikasi dalam pengembangan potensi desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji evaluasi perencanaan komunikasi pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.
2. Untuk mengetahui evaluasi kolaborasi dalam pengembangan potensi desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong
3. Untuk mengetahui evaluasi hambatan komunikasi dalam pengembangan potensi desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengkaji bagaimana penerapan teori-teori fungsional itu dan di implementasikan dalam perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan akademik mahasiswa di dalam bidang pemasaran.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata lembang bo'ne buntu sisong

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan disajikan beberapa sebagai upaya meninjau kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian yang relevan membantu peneliti mencari tahu apa yang belum dipelajari atau dibahas oleh penelitian lain, dan menjadi bahan pemikiran untuk penelitian selanjutnya. Maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi pembahasannya bersangkutan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Elok Perwirawati, Bantors Sihombing, dan Prietsaweny Riris T Simamora (2022) berjudul *"Perencanaan Komunikasi Pariwisata Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Hilisataro Nandisa Menuju Desa Wisata Berbasis Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan"* menemukan bahwa untuk membantu masyarakat dalam merencanakan pengembangan sektor pariwisata dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan melalui perencanaan komunikasi pariwisata untuk menciptakan model pengembangan pariwisata yang berbasis ilmu komunikasi yang berfokus pada pemasaran produk pariwisata dan penemuan metode komunikasi yang efektif. Diharapkan bahwa ini akan menghasilkan sinergi yang baik antara masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pemerintah desa untuk mendorong pengembangan desa menjadi desa wisata. Hal ini penting agar

pengembangan pariwisata di desa Hilisataro Nandisa tetap sejalan dengan misi pembangunan pariwisata daerah serta visi dan misi desa. Selain itu, berbagai masalah yang dihadapi desa terkait regulasi, koordinasi, distribusi, penelitian, serta pelatihan pengembangan desa hingga desa wisata dapat diatasi melalui pendekatan komunikasi.

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama menekankan pentingnya komunikasi dalam pengembangan pariwisata. sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas penekankan pada regulasi dan peraturan daerah dalam perencanaan komunikasi pariwisata. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang strategi dan model perencanaan komunikasi yang efektif dalam mengembangkan pariwisata di Desa.

Kedua, penelitian Yasir (2021) berjudul *"Komunikasi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar"* bertujuan untuk menjelaskan peran komunikasi pariwisata dalam membangun destinasi wisata, menjelaskan partisipasi masyarakat, dan memperoleh pemahaman tentang model perencanaan komunikasi pariwisata di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Dimana menggunakan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa strategi komunikasi pariwisata pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan destinasi wisata termasuk menciptakan beberapa desa wisata, memberikan pelatihan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan mendorong partisipasi pengembangan di daerah destinasi wisata melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan pengembangan Pokdarwis serta

keterlibatan masyarakat setempat dapat membantu mengembangkan destinasi wisata Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok.

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis komunikasi pariwisata. Sedangkan perbedaannya yaitu, berfokus agar perencanaan komunikasi pariwisata di kawasan destinasi wisata Pulau Belimbing lebih kreatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan aspirasi masyarakat lokal, sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan desa menuju desa wisata berbasis sustainable tourism development serta menekankan pada pembentukan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Surita Annazmi Sinaga (2023) berjudul *"Perencanaan Komunikasi Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Religi di Kota Pekanbaru"* mengkaji bagaimana perencanaan komunikasi pariwisata dapat berkontribusi pada peningkatan wisata religi di Kota Pekanbaru. Studi ini menggunakan metode deskriptif. Beberapa teori yang digunakan termasuk AIDA dan Teori Interaksi Simbolik. Tujuh orang yang terlibat dalam penelitian ini adalah tiga pengunjung Masjid Agung An-Nur, Humas Masjid Agung An-Nur, Kepala Seksi Pengkajian & Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Riau, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Provinsi Riau, dan Kepala Seksi Tata Usaha Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi pariwisata untuk mengembangkan wisata religi di Masjid Agung An-Nur belum sepenuhnya berjalan

dengan baik. Terdapat kebutuhan untuk mendorong kerjasama antara pihak pengelola, Dinas Pariwisata, dan masyarakat untuk meningkatkan jumlah pengunjung serta kualitas bangunan masjid, sehingga minat wisatawan dapat meningkat di masa depan.

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama berfokus pada pengembangan destinasi wisata, meskipun satu berorientasi pada wisata religi dan satunya pada desa wisata namun tujuan utama dari kedua penelitian ini adalah merancang strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan partisipasi masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu, meningkatkan kesadaran dan promosi wisata religi secara umum dan analisis yang lebih spesifik terhadap implementasi di Masjid Agung An-Nur, sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus pada Peningkatan sinergitas antara masyarakat desa, stakeholder pemerintah desa, dan pemerintah daerah agar arah pengembangan pariwisata tetap berada pada misi pembangunan kepariwisataan daerah dan sejalan dengan visi serta misi desa.

Keempat, Penelitian yang telah dilakukan oleh Lintang Zeny Setyaningrum, Andre N. Rahmanto, Basuki Agus Suparno (2022) dengan judul *“Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di “Nepal Van Java” Dusun Butu, Kabupaten Magelang”*. Penelitian ini mengkaji komunikasi pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Dusun Butuh, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi pariwisata berkontribusi pada pengembangan destinasi wisata, serta untuk memahami partisipasi masyarakat dan model perencanaan komunikasi pariwisata di Dusun Butuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pariwisata pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengembangkan destinasi mencakup pembentukan beberapa desa wisata, pengembangan kelompok masyarakat sadar wisata (Pokdarwis), dan partisipasi pengembangan di kawasan destinasi melalui pengabdian masyarakat dengan pemangku kepentingan pemerintah dan pemberi nasihat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi Nepal Van Java di Kabupaten Magelang dilakukan dengan memberdayakan Pokdarwis, mendorong partisipasi masyarakat sekitar, dan mengadakan berbagai acara dan paket wisata agro.

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama memiliki fokus pada pengembangan desa wisata dan partisipasi masyarakat dalam penelitian, sedangkan perbedaannya yaitu, Penelitian terdahulu menekankan penggunaan media sosial untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata, sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus pada Tantangan meliputi kesiapan aparatur, keterbatasan SDM dalam pengelolaan sistem kerja website, dan kawasan yang kurang memadai dalam hal mengakses internet.

B. Tinjauan Teoritis

1. Model Perencanaan Komunikasi

Perencanaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan. Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan (*future oriented*). Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis tentang serangkaian tindakan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan komunikasi untuk mengubah perilaku yang diinginkan.

Menurut Azwar, perencanaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah logis untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan di masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi serta memanfaatkan sumber daya yang ada.⁸ Menurut George (2012) Steiner menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, serta rencana yang sangat rinci untuk mencapainya. Proses ini juga mencakup upaya organisasi dalam menerapkan keputusan dan melibatkan peninjauan kinerja serta umpan balik yang berkaitan dengan pengenalan siklus rencana yang baru.⁹

Weenburg et al. menjelaskan tiga bentuk komunikasi: (1) komunikasi sebagai tindakan satu arah (*linier*), di mana pesan disampaikan dari sumber ke penerima, (2) komunikasi sebagai interaksi, di mana terjadi komunikasi dua arah dengan umpan balik yang membantu memastikan pemahaman, dan (3) komunikasi sebagai transaksi, di mana komunikasi terjadi melalui penafsiran perilaku verbal maupun nonverbal. Pengalaman individu juga mempengaruhi proses komunikasi ini. Terjadinya komunikasi karena adanya unsur-unsur pendukung.

Perencanaan komunikasi merupakan dokumen tertulis yang merinci langkah-langkah tentang bagaimana sebuah kegiatan komunikasi akan atau perlu dilaksanakan untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan.¹⁰ Perencanaan komunikasi bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mencapai komunikasi yang efektif. Dari segi fungsi dan manfaat, perencanaan ini diperlukan untuk melaksanakan program-program yang ingin dicapai, baik itu

⁸ Susila et al., "Tourism Village Development Strategy Based on Local Resources in Ayunan Village, Abiansema District, Badung Regency."

⁹ Molle, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Pantai Natsepa Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah."

¹⁰ Romadhan and Pradana, "Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Segunung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat."

dalam hal pencitraan, pemasaran, penyebaran ide, kerjasama, maupun pengembangan infrastruktur komunikasi digital yang saat ini dipandang sangat penting bagi kemajuan pariwisata suatu daerah.¹¹

Menurut Jhon Middleton, Perencanaan komunikasi adalah proses menyusun sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini mencakup tidak hanya komunikasi interpersonal dan media massa, tetapi juga segala jenis kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku dan menumbuhkan keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam rangka memenuhi tugas organisasi, tentunya pariwisata telah lama menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai negara.¹² Perencanaan komunikasi sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan target audiens. Keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga bergantung pada perencanaan ini. Oleh karena itu, merencanakan komunikasi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan.¹³

Perencanaan komunikasi sangat penting dilakukan sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan observasi. Menurut buku karya Hafied Cangara, komunikasi sering kali menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna mencapai komunikasi yang efektif.

¹¹ Suarja, Dewi, and Mataram, "Tourism Marketing Strategy Based on Superior Potential of Pelaga Tourism Village, Petang District, Badung Regency."

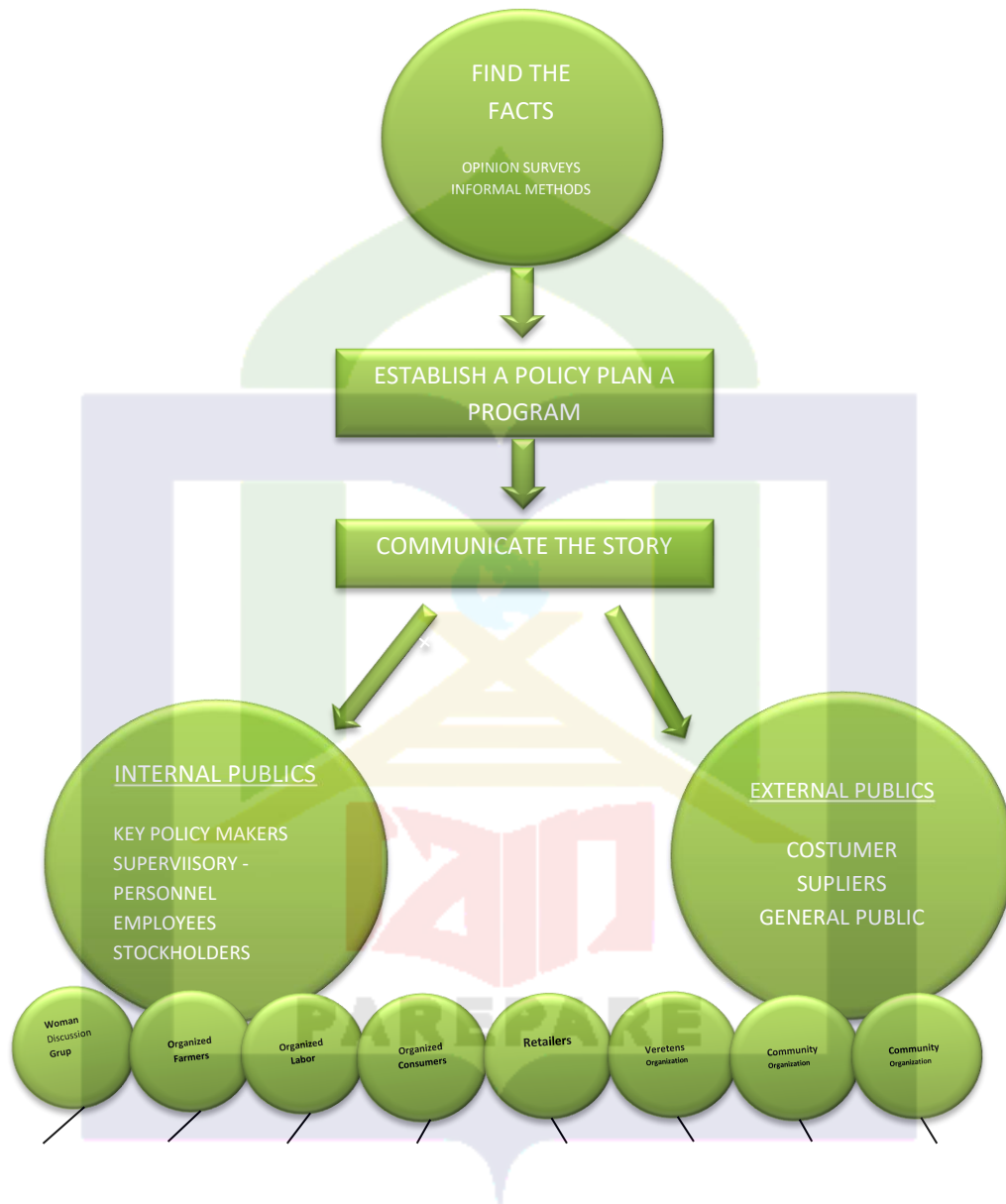
¹² Tangkudung and Tangkudung, "Management Event of Sport Tourism (Dragon Boat Race) in Lake Toba North Sumatera."

¹³ Candra, "Perencanaan Komunikasi Humas Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Aplikasi Jemari Di Pekanbaru."

Astrid S.Susanto (1974) telah memperkenalkan model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh Cutlip dan Center. Pada saat itu, Cutlip dan Center membuat model proses Public Relations, yang belum dikenal sebagai model perencanaan komunikasi. Namun, perencanaan komunikasi adalah inti dari proses tersebut. Dimulai dengan penemuan fakta (*fact finding*), perencanaan (*planning*), dan komunikasi.

Model Cutlip dan Center memberikan struktur yang jelas untuk perencanaan komunikasi dalam konteks pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, perencanaan dapat lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pengembangan desa wisata serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan minat wisatawan. Perencanaan komunikasi sangat penting dalam merancang strategi komunikasi agar program dapat berhasil. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik.

Model perencanaan komunikasi berbasis public relations yang dikembangkan oleh Cutlip dan Center mencakup empat langkah utama yang saling berhubungan, yaitu penemuan fakta, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi.



Gambar 2.1 Model Perencanaan Komunikasi Berbasis Public Relations oleh
Cultip dan Center

Langkah pertama, penemuan fakta (*find the facts*), melibatkan pengumpulan data melalui survei opini dan metode informal untuk memahami pengetahuan, sikap, dan perilaku publik terkait dengan organisasi. Proses ini penting untuk menentukan kondisi saat ini dan mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi.

Dalam konteks Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong, penemuan fakta mengungkap beberapa isu kritis yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan desa wisata tersebut:

- a. Fakta Pertama: Desa Bo'ne Buntu Sisong pernah dibuka sebagai desa wisata, namun operasionalnya terhenti setelah beberapa waktu. Selama periode ini, desa tersebut berhasil menarik pengunjung dan menghasilkan dokumentasi foto yang menunjukkan potensi wisata yang ada. Namun, setelah penutupan, tidak ada upaya yang konsisten untuk mempertahankan minat pengunjung atau mengembangkan pengalaman wisata yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi, kurangnya perencanaan dan strategi komunikasi yang jelas menyebabkan hilangnya momentum.
- b. Fakta Kedua: Hingga saat ini, belum ada kebijakan formal dari pemerintah desa terkait pengembangan desa wisata. Ketidakjelasan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai arah dan tujuan pengembangan desa wisata. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, masyarakat tidak memiliki pedoman untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan, sehingga mereka merasa terasing dari inisiatif tersebut.
- c. Fakta Ketiga: Permasalahan juga muncul dari dinamika antara publik eksternal dan internal, atau yang sering disebut sebagai *stakeholder*. Publik eksternal mencakup wisatawan, lembaga donor seperti Baznas, dan pihak-

- pihak lain yang berkepentingan dengan keberadaan desa wisata. Sementara itu, publik internal meliputi masyarakat lokal dan pemerintah desa itu sendiri. Ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Misalnya, jika masyarakat lokal tidak merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka mungkin enggan mendukung inisiatif tersebut.
- d. Fakta Keempat: Meskipun Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong pernah dibuka untuk umum, hingga saat ini tidak terlihat adanya peningkatan signifikan pada objek wisata, terutama dari segi fasilitas yang disediakan. Fasilitas dasar seperti akomodasi, aksesibilitas, dan sarana pendukung lainnya masih minim dan tidak memadai untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini menciptakan kesan bahwa desa tersebut tidak berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisatanya secara serius. Tanpa adanya investasi dalam perbaikan dan pengembangan objek wisata, seperti penyediaan homestay yang nyaman, jalur transportasi yang baik, serta promosi yang efektif, keberlanjutan desa wisata ini menjadi semakin diragukan dan berisiko kehilangan daya tarik bagi wisatawan.
- e. Fakta Kelima: Setelah pihak Baznas menghentikan dukungannya, Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong mengalami kekosongan dalam hal pengelolaan dan kepemimpinan, yang berakibat pada tidak adanya pengurus atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program wisata. Kekurangan ini menciptakan tantangan besar bagi keberlanjutan inisiatif desa wisata, karena tanpa adanya individu atau tim yang memiliki visi dan komitmen untuk mengelola operasional sehari-hari, semua rencana dan potensi yang ada menjadi terabaikan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan membuat masyarakat lokal merasa bingung dan kehilangan arah, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam

pengembangan desa wisata. Tanpa pengelola yang kompeten dan berpengalaman, upaya untuk menghidupkan kembali daya tarik wisata desa ini menjadi semakin sulit.

- f. Fakta Keenam: Kehadiran Baznas sebagai lembaga yang memberikan binaan kepada masyarakat lokal dalam pengembangan kopi dan wisata di Desa Bo'ne Buntu Sisong sangat berarti, namun sayangnya program tersebut tidak berlanjut setelah kontrak berakhir. Ketika dukungan Baznas dihentikan, tidak ada upaya untuk memperpanjang kontrak atau mencari alternatif pengelola yang dapat melanjutkan program tersebut. Akibatnya, masyarakat binaan yang sebelumnya mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam mengelola wisata kopi tidak memiliki keahlian yang cukup untuk melanjutkan operasional secara mandiri. Tanpa adanya pengelola yang berkompeten dan dukungan berkelanjutan, potensi wisata kopi di desa ini terancam hilang, dan masyarakat lokal kembali menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sektor pariwisata yang sebelumnya telah dibangun.

Memahami fakta-fakta ini melalui model Cutlip dan Center, pihak-pihak terkait dapat merumuskan strategi komunikasi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan yang ada. Penemuan fakta menjadi langkah awal yang krusial dalam menciptakan sinergi antara semua *stakeholder* agar pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Setelah fakta-fakta tersebut terkumpul, langkah kedua adalah perencanaan (*establish a policy*), di mana informasi yang diperoleh digunakan untuk merumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Dimana merumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam konteks Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong,

perencanaan kebijakan harus melibatkan penentuan publik sasaran yang tepat, strategi komunikasi yang efektif, serta tujuan program yang ingin dicapai. Misalnya, penting untuk mengidentifikasi masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan desa wisata ini, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, strategi komunikasi perlu dirancang untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dan program disampaikan dengan jelas kepada semua pihak terkait, termasuk pengunjung potensial dan lembaga pendukung. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menciptakan sinergi antara semua *stakeholder*, sehingga pengembangan desa wisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan lingkungan setempat.

Rencana aksi untuk menerapkan pengembangan komunikasi di Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong harus melibatkan kolaborasi yang erat antara berbagai *stakeholder*, termasuk masyarakat lokal, pemerintah desa, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah. Langkah pertama adalah membentuk forum atau kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masing-masing *stakeholder* untuk mendiskusikan visi dan misi pengembangan desa wisata secara bersama-sama. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka, sehingga rencana komunikasi yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan harapan semua pihak. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan meningkatkan daya tarik wisata desa secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan bagi masyarakat lokal agar mereka memiliki keterampilan dalam pengelolaan komunikasi, baik secara digital maupun

tradisional, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mempromosikan potensi desa wisata.

Untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses pengembangan komunikasi, penting untuk melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi potensi tantangan sejak awal. Misalnya, jika ada kekhawatiran mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, maka rencana aksi dapat mencakup program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Selain itu, perencanaan komunikasi harus mencakup strategi untuk mengatasi kesenjangan informasi antara publik internal dan eksternal. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem umpan balik yang efektif, seperti survei atau forum diskusi, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif ini, diharapkan pengembangan komunikasi di Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh *stakeholder*.

Setelah perencanaan selesai, langkah ketiga dalam model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center adalah komunikasi (*communicate the story*), yang terbagi menjadi dua kategori: *internal publics* dan *external publics*. Internal publics mencakup semua individu dan kelompok di dalam organisasi atau komunitas, seperti masyarakat lokal, pengurus desa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Dalam konteks Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong, penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal memahami kebijakan dan program yang telah direncanakan, serta peran mereka dalam pengembangan desa wisata. Melalui rapat komunitas, pelatihan, dan diskusi terbuka, informasi dapat

disampaikan dengan cara yang mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan rasa memiliki terhadap inisiatif tersebut.

Sementara itu, external publics mencakup pihak-pihak di luar organisasi atau komunitas yang memiliki kepentingan terhadap desa wisata, seperti wisatawan, media, lembaga donor, dan pemerintah daerah. Komunikasi dengan kelompok ini bertujuan untuk membangun citra positif dan menarik minat mereka terhadap Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong. Strategi komunikasi yang efektif bisa meliputi penggunaan media sosial untuk mempromosikan keunikan budaya dan potensi wisata desa, penyelenggaraan event atau festival lokal untuk menarik perhatian wisatawan, serta kolaborasi dengan media untuk menampilkan cerita-cerita inspiratif dari masyarakat lokal. Dengan mengkomunikasikan cerita desa secara efektif kepada kedua kelompok publik ini, diharapkan dapat tercipta dukungan yang kuat untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Pentingnya komunikasi ini adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak terkait serta mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Akhirnya, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari program-program yang telah dilaksanakan, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan tujuan awal dan memberikan dampak positif bagi organisasi serta publiknya. Model perencanaan komunikasi berbasis public relations yang dikembangkan oleh Cutlip dan Center dapat diterapkan dalam konteks pengembangan komunikasi di Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang diusulkan oleh model tersebut, seperti penemuan fakta, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi, sangat relevan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi desa tersebut. Penemuan fakta awal

menunjukkan bahwa desa ini pernah dibuka sebagai desa wisata namun terhenti karena kurangnya pengelola dan kebijakan yang jelas. Dengan menggunakan model ini, pihak terkait dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan strategi komunikasi yang melibatkan semua *stakeholder*, termasuk masyarakat lokal dan lembaga pendukung.

Selanjutnya, dalam tahap perencanaan, penting untuk menetapkan publik sasaran dan tujuan program yang ingin dicapai. Melalui kolaborasi dengan *stakeholder*, rencana aksi dapat disusun untuk meningkatkan fasilitas wisata dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Komunikasi yang efektif harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai pengembangan desa disampaikan kepada publik internal dan eksternal. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai keberhasilan implementasi program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan menerapkan model Cutlip dan Center secara komprehensif, diharapkan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Setiap elemen ini berperan sebagai publik yang terlibat dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Misalnya, kelompok diskusi wanita dapat memberikan perspektif unik tentang kebutuhan dan harapan masyarakat, sementara petani terorganisir dapat menyampaikan informasi tentang potensi produk lokal yang dapat dipasarkan di desa wisata. Dengan melibatkan berbagai kelompok ini, perencanaan komunikasi menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong, model perencanaan komunikasi berbasis public relations oleh Cutlip dan Center dapat diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor di masyarakat yang berperan penting dalam keberhasilan program tersebut. Pertama, kelompok diskusi wanita dapat menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan perempuan di desa, yang sering kali memiliki perspektif unik tentang pengembangan wisata yang inklusif. Selain itu, petani terorganisir (*organized farmers*) dapat memberikan informasi tentang produk lokal yang dapat dipasarkan kepada wisatawan, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi desa. Keterlibatan kelompok-kelompok ini dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan diakomodasi. Dan pemimpin (*leaders*) juga sangat penting dalam membangun jaringan dukungan yang kuat untuk program-program wisata. Dengan memanfaatkan semua faktor ini, perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong dapat dilakukan secara efektif, menciptakan sinergi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan desa.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

2. Teori Perencanaan Pariwisata

Berdasarkan pandangan Inskeep, perencanaan ini meliputi pengembangan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, dengan mempertimbangkan potensi daya tarik, fasilitas yang tersedia, serta kebutuhan pasar. Proses

perencanaan ini juga melibatkan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat setempat, dan sektor swasta.¹⁴

Menurut Syani Prananto, pariwisata adalah fenomena kompleks yang melibatkan pergerakan orang ke lokasi berbeda untuk rekreasi, bisnis, atau pendidikan. Definisi pariwisata bervariasi berdasarkan perspektif dan konteks. Secara umum, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan orang ke tempat yang berbeda dari lingkungan sehari-hari untuk menginap dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan utama liburan atau bisnis, tanpa menghasilkan pendapatan di lokasi yang dikunjungi.¹⁵ Hartati et al. (2022) mengutip UNWTO yang menyatakan bahwa pariwisata mencakup aktivitas perjalanan ke luar tempat tinggal, baik domestik maupun internasional, untuk tujuan liburan, bisnis, atau pekerjaan lain, selama kurang dari satu tahun, dan menekankan sifat sementara dari kunjungan ini, yang membedakannya dari migrasi.

Berbagai jenis pariwisata telah diklasifikasikan untuk memahami variasi dan spesifikasi dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis pariwisata yang dikenal meliputi:

a. Pariwisata Alam

Berkaitan dengan kunjungan ke taman nasional, gunung, pantai, dan area alam lainnya untuk menikmati keindahan alam serta kegiatan rekreasi seperti hiking, berenang, atau observasi satwa liar.¹⁶

¹⁴ Chomsatun, H. (2022). *Strategi Pengembangan Wisata Budaya Yang Berkelanjutan Di Destinasi Wisata Djagongan Koena Kejawa Banyumas* (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).

¹⁵ Mauliddiyah, "Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Dan Potensi Ekonomi Lokal Di Kampung Waerebo, Nusa Tenggara Timur."

¹⁶ Wula, "Potensi Desa Wisata Rende."

b. Pariwisata Budaya

Fokus pada warisan budaya dan tradisi suatu daerah, termasuk kunjungan ke situs bersejarah, festival budaya, museum, dan acara seni tradisional.¹⁷

c. Pariwisata Sejarah

Berkaitan dengan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan warisan budaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, seperti kastil, pura, atau reruntuhan kuno.¹⁸

d. Pariwisata Petualangan

Melibatkan kegiatan yang menantang secara fisik, seperti hiking gunung tinggi, rafting di sungai-sungai deras, atau menyelam di terumbu karang.¹⁹

e. Pariwisata Kuliner

Mengacu pada wisata yang berkaitan dengan pengalaman gastronomi suatu daerah, termasuk tur kuliner, festival makanan, dan belajar tentang masakan lokal.²⁰

Menurut Gunn²¹ tujuan perencanaan pariwisata meliputi:

- a. Memaksimalkan potensi daya tarik wisata yang ada di suatu wilayah.
- b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata.

¹⁷ SHELEMO, “Strategi Pengembangan Wisata Kuliner Desa Wisata Kampung Lama Kabupaten Deli Serdang Berbasis Potensi Lokal.”

¹⁸ Wula, “Potensi Desa Wisata Rende.”

¹⁹ Darmawan and Rahmawati, “Pengembangan Potensi Wisata Alam Desa Cau Belayu.”

²⁰ Rahmatin, “Analisis Potensi Budaya Lokal Sebagai Atraksi Wisata Dusun Segunung.”

²¹ Setiawan et al., *BUKU AJAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA*.

- c. Melindungi lingkungan serta melestarikan warisan budaya.
- d. Menciptakan pengalaman positif bagi para wisatawan.
- e. Memastikan keberlanjutan destinasi wisata dalam jangka panjang.

Menurut Yoeti²² prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan kepariwisataan untuk penataan ruang di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan pariwisata harus merupakan bagian dari pembangunan regional dan nasional yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi suatu negara.
- b. Menggunakan pendekatan yang holistik dan terpadu.
- c. Dikoordinasikan dengan perencanaan fisik daerah.
- d. Perencanaan fisik di suatu daerah harus mempertimbangkan hasil penelitian mengenai faktor geografi, bukan hanya berdasar pada faktor administratif.
- e. Memperhatikan faktor lingkungan.
- f. Mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul.
- g. Dalam perencanaan pariwisata di sekitar kawasan industri, perlu lebih fokus pada penyediaan fasilitas hiburan.
- h. Tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penting untuk mempertimbangkan peningkatan kerjasama dengan negara lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Perencanaan pariwisata memiliki peran penting dalam menciptakan citra suatu destinasi. Membangun citra pariwisata bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan perencanaan yang mencakup berbagai aspek. Tentu saja, terdapat berbagai tantangan dalam perencanaan pariwisata, sehingga dibutuhkan strategi

²² Mebri, Suradinata, and Kusworo, "Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province."

untuk mengatasi masalah tersebut. Merencanakan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan dampak negatif dari industri ini.²³

Sektor pariwisata memiliki posisi yang unik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun sosial, serta meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam pariwisata seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang bertentangan, melainkan sebagai tujuan yang saling mendukung.

Teori dan konsep pengembangan pariwisata menjadi kunci dalam merancang strategi yang efektif untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata suatu destinasi. Konsep-konsep ini mencakup pengelolaan destinasi, pemasaran pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata, dan keberlanjutan pariwisata.²⁴

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berfokus pada tiga pilar utama: lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial budaya. Menurut Bramwell dan Lane (1993) pengembangan ini perlu mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap lingkungan, kesejahteraan komunitas lokal, dan pelestarian warisan budaya. Hal ini mencakup kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.²⁵

²³ Andriani et al., *Perancangan Pariwisata*.

²⁴ Kurniawan et al., "Pemetaan Rintisan Tata Kelola Wisata Menggunakan Drone Di Desa Kuripan."

²⁵ Bramwell et al., "Twenty-Five Years of Sustainable Tourism and the Journal of Sustainable Tourism : Looking Back and Moving Forward."

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting untuk mempertahankan daya tarik wisata dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta budaya lokal.²⁶ Pengembangan pariwisata juga berdampak langsung pada ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Namun, sisi lain dari pengembangan pariwisata adalah potensi dampak negatif terhadap lingkungan, perubahan sosial budaya, dan kelestarian warisan lokal.²⁷

Teori dan konsep pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pendekatan dan strategi untuk mengelola dan meningkatkan destinasi pariwisata. Berikut adalah beberapa faktor teori sebagai konsep yang umum digunakan dalam pengembangan pariwisata:

a. Pengembangan Berkelanjutan

Saputra menekankan bahwa teori ini mengangkat pentingnya mengembangkan pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak merusak sumber daya alam dan budaya yang ada, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal. Pengembangan Berkelanjutan dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong di Sulawesi Selatan merupakan sebuah paradigma yang sangat penting demi menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, sosial,

²⁶ Reza and Murdana, "Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif Di Lombok Tengah."

²⁷ Satato, Yuliamir, and Rahayu, "Potensi Wisata Kampung Pelangi Sebagai Daya Tarik Wisata."

dan ekonomi. Desa ini telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai pengembangan berkelanjutan, seperti melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi program wisata. Hal ini tercermin dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan melalui aktivitas jungle tracking yang ramah lingkungan, serta pengembangan industri souvenir yang menggunakan produk lokal seperti Kopi Tondok, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga melestarikan warisan kuliner tradisional. Selain itu, desa ini juga berusaha meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, sehingga mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong dapat menjadi contoh ideal dalam pengembangan desa wisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi.²⁸

b. Model Destinasi Pariwisata

Ratwianingsih menggambarkan bahwa teori ini menggambarkan hubungan antara elemen-elemen yang mempengaruhi pengembangan destinasi pariwisata, seperti atraksi, infrastruktur, akomodasi, aksesibilitas, dan pemasaran. Model-model ini membantu dalam merancang strategi Model destinasi pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong di Sulawesi Selatan berfokus pada penciptaan pengalaman wisata yang holistik dan berkelanjutan. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, seperti panorama pegunungan dan jalur trekking yang

²⁸ Saputra et al., "Analisis Swot Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Dan Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Desa Aik Berik Lombok Tengah."

menantang, tetapi juga mengintegrasikan aspek budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan wisata. Selain itu, model destinasi pariwisata ini juga menekankan pentingnya edukasi bagi pengunjung. Lembang Bo'ne Buntu Sisong berupaya menciptakan program-program yang tidak hanya menyajikan keindahan alam tetapi juga memberikan wawasan tentang budaya dan tradisi masyarakat setempat sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal.²⁹

c. Ekonomi Pariwisata

Fadlina (2021) meliputi analisis dampak ekonomi dari pariwisata, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengeluaran wisatawan, dan efek multiplier terhadap perekonomian lokal. Teori ini membantu dalam mengukur kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi Pariwisata dapat diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong di Sulawesi Selatan untuk memahami dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata terhadap masyarakat lokal. Dalam konteks ini, desa wisata berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan wisata, seperti homestay, penjualan produk lokal, dan atraksi alam. Lebih lanjut, teori ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga pada

²⁹ Ratwianingsih, Mulyaningsi, and Johadi, "Analisis Potensi Dan Upaya Pengembangan Desa Wisata Alam Kepuhsari Manyaran Wonogiri."

penciptaan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Penerapan berbagai teori dan konsep ini membantu dalam merancang kebijakan, strategi pengembangan, dan manajemen destinasi pariwisata yang holistik dan berkelanjutan. Setiap teori memberikan pandangan yang berbeda namun saling terkait untuk mengoptimalkan manfaat pariwisata secara keseluruhan sambil meminimalkan dampak negatifnya.³⁰

C. Tinjauan Konseptual

1. Perencanaan Komunikasi

Menurut buku penting Perencanaan dan Strategi Komunikasi, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan cara menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapainya secara efektif dan efisien. Dalam literatur yang ada, perencanaan komunikasi diartikan sebagai penggunaan secara terencana dari berbagai metode komunikasi untuk memecahkan masalah tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sebuah rencana komunikasi yang baik harus jelas, konkret, dan fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang mungkin terjadi. Singkatnya, perencanaan adalah penentuan tujuan tertentu dan metode yang akan digunakan untuk mencapainya.³¹

³⁰ Fadlina, "Pembangunan Destinasi Pariwisata Di Kelurahan Muara Enim Melalui Pendekatan Pengembangan Kampung Wisata."

³¹ Athik Hidayatul Ummah, Gustian Djuanda, Daelami Ahmad, Eka Sri Dana Afriza, Fadli Muhammad Athalarik, Fatmawati Moekahar, Ni Desak Made Santi Diwyarthi, Al Sukri, Opan Arifudin, Ni Putu Sinta Dewi, Sri Ayu Rayhaniah, I Wayan Adi Pratama, *Komunikasi Korporat*.

Meskipun demikian, perencanaan komunikasi adalah proses mengatur sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya ini tidak hanya mencakup komunikasi antarpribadi dan media massa, tetapi juga setiap aktivitas yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan menanamkan keterampilan tertentu di individu dan kelompok dalam lingkup tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, John Middleton (1978).³²

Menurut Cangara³³ beberapa dasar perencanaan komunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan komunikasi adalah usaha yang dilakukan secara sengaja;
- b. Perencanaan komunikasi ditulis.
- c. Perencanaan komunikasi adalah penerapan seni dan ilmu komunikasi.
- d. Perencanaan komunikasi adalah aktivitas yang disusun secara sistematis dari satu proses ke proses berikutnya.
- e. Perencanaan komunikasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- f. Perencanaan komunikasi menetapkan alokasi sumber daya, termasuk dana, barang, alat, tenaga manusia atau keahlian, dan program, untuk mencapai tujuan tersebut.
- g. Perencanaan komunikasi mencakup komponen komunikasi seperti sumber, pesan, media, target sasaran, dan efek (perubahan) sebagai bagian dari audit.
- h. Perencanaan komunikasi memerlukan pengukuran hasil atau evaluasi.

Dokumen yang bertanggung jawab atas perencanaan komunikasi harus dapat menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Tujuan apa yang ingin dicapai?

³³ Athik Hidayatul Ummah, Gustian Djuanda, Daelami Ahmad, Eka Sri Dana Afriza, Fadli Muhammad Athalarik, Fatmawati Moekahar, Ni Desak Made Santi Diwyarthi, Al Sukri, Opan Arifudin, Ni Putu Sinta Dewi, Sri Ayu Rayhaniah, I Wayan Adi Pratama, *Komunikasi Korporat*.

(2) Untuk alasan apa kita mengharapkan hasil tersebut? (3) Sasaran siapa? (4) Apa kata kunci yang akan digunakan dalam pesan? (5) Bagaimana menentukan aktor penyampaian pesan dan siapa yang akan dipilih? (6) Bagaimana tujuan yang dimaksud dapat dicapai? (7) Jenis jalur komunikasi apa yang dapat digunakan untuk mengirimkan pesan? (8) Kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan setiap pesan? (9) Bagaimana cara mengukur dan menilai hasil implementasi program.³⁴

2. Pengembangan Wisata

Secara etimologis, istilah "pengembangan" berakar dari proses kolaboratif yang dilakukan oleh komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang progresif, sempurna, dan bermanfaat. Ardhana, mendefinisikan pengembangan sebagai penerapan pengetahuan ilmiah secara sistematis dalam proses produksi bahan, sistem, atau metode, termasuk pembuatan berbagai prototipe.³⁵ Pengembangan melibatkan peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pelatihan. Seels dan Richey, menyatakan bahwa pengembangan melibatkan proses transformasi spesifikasi desain menjadi produk fisik, khususnya dalam konteks produksi materi pendidikan. Sebaliknya, Tessmer dan Richey, menekankan bahwa pengembangan tidak hanya mencakup analisis kebutuhan tetapi juga analisis kontekstual yang lebih luas, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan produk yang berfungsi sesuai

³⁴ Athik Hidayatul Ummah, Gustian Djuanda, Daelami Ahmad, Eka Sri Dana Afriza, Fadli Muhammad Athalarik, Fatmawati Moekahar, Ni Desak Made Santi Diwyarthy, Al Sukri, Opan Arifudin, Ni Putu Sinta Dewi, Sri Ayu Rayhaniah, I Wayan Adi Pratama.

³⁵ Hendrawati, "Pengembangan Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Menulis Cerita Rakyat Berbasis Literasi Siswa Kelas X SMA Swasta Al-Hidayah Medan."

dengan hasil uji lapangan. Secara keseluruhan, pengembangan dapat dianggap sebagai upaya terencana dan terarah untuk menciptakan atau menyempurnakan produk yang lebih berguna, meningkatkan kualitas, dan menghasilkan produk yang lebih baik.³⁶

Pengembangan pariwisata adalah usaha untuk memperbaiki atau memajukan objek wisata sehingga menjadi lebih baik dan lebih menarik bagi wisatawan dan menarik lebih banyak wisatawan. Tujuan dari pengembangan pariwisata adalah agar lebih banyak wisatawan datang ke suatu tempat wisata, tinggal lebih lama, dan mengeluarkan lebih banyak uang di sana untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Addriyanto, B., Ilham, M., dan Wargadinata, E. (2020) pengembangan adalah cara untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik tempat wisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan membuat pemerintah dan masyarakat merasakan manfaatnya.³⁷

Suwarti dan Yuliamir (2017)³⁸ menyatakan bahwa ada tiga komponen penting yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata:

- a. Manusia, yang berfungsi sebagai subjek utama dalam menjalankan segala kegiatan pariwisata;
- b. Tempat, yang berfungsi sebagai wadah fisik dari segala kegiatan pariwisata.
- c. Waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengunjung untuk pergi ke tempat wisata.

³⁶ Prasetyo and Hamami, "PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM."

³⁷ Adariyanto, Ilham, and Wargadinata, "Pengembangan Pariwisata Bono Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau."

³⁸ Amalia Yunia Rahmawati, "PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI DAYA TARIK WISATA (Studi Pada Kampoenng Vietnam Lampung) (Skripsi)."

Menurut Apriliyana Selin Marsela, A. W. (2020)³⁹, ada empat prinsip utama yang mendasari pengembangan pariwisata. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Keberlangsungan ekologi, yang berarti bahwa pengembangan pariwisata dapat menjamin pemeliharaan wisata tersebut.
- b. Keberlangsungan kehidupan dan budaya, yang berarti bahwa pengembangan pariwisata akan meningkatkan peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.
- c. Keberlangsungan ekonomi, yang berarti bahwa pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada ekonomi negara.

3. Potensi Pariwisata Desa

Menurut Yuliani & Abdi (2022), pengembangan pariwisata desa menjadi fokus utama dalam upaya memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung ekonomi dan mempromosikan warisan budaya serta alam yang unik⁴⁰. Bagian ini menjelaskan konsep dan definisi potensi pariwisata, serta faktor-faktor yang mempengaruhi potensi wisata suatu daerah⁴¹. Pariwisata adalah aktivitas yang melibatkan perjalanan individu atau kelompok ke luar lingkungan mereka biasanya untuk waktu yang singkat. Potensi pariwisata merujuk pada kemampuan suatu daerah atau lokasi untuk menarik wisatawan dengan menawarkan atraksi alam, budaya, sejarah, atau keunikan lainnya⁴².

³⁹ Kandri et al., "Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kehilangan Mata Pencahariannya."

⁴⁰ R Yuliani, M Abdi, "Strategi Pengembangan Penginapan Lokal (Homestay) Untuk Mendukung Desa Wisata Kampung Saribu Gonjong Kabupaten Lima Puluh Kota".

⁴¹ R Yuliani, M Abdi.

⁴² Pratama, "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa Di Kabupaten Probolinggo."

Potensi ini bisa dilihat dari kekayaan alam, ketersediaan infrastruktur pariwisata, dan dukungan masyarakat setempat serta pemerintah dalam pengembangan destinasi tersebut. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Potensi Wisata Suatu Daerah meliputi:

a. Kekayaan Alam

Daerah yang memiliki keindahan alam seperti pantai, gunung, danau, hutan, atau cagar alam cenderung memiliki potensi pariwisata yang besar. Keindahan alam ini dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang unik⁴³.

b. Warisan Budaya

Keberadaan situs bersejarah, bangunan bersejarah, seni tradisional, atau kebiasaan budaya yang unik menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan yang tertarik pada budaya lokal dan sejarah suatu daerah⁴⁴.

c. Infrastruktur Pariwisata

Ketersediaan infrastruktur seperti akomodasi (hotel, homestay), transportasi (jalan raya, bandara), fasilitas umum (toilet, tempat makan), dan sarana pendukung lainnya sangat mempengaruhi kemudahan akses dan kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi tersebut⁴⁵.

⁴³ Halil et al., "Tinjauan Kolaboratif Dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi Di Maluku Utara."

⁴⁴ Santoso et al., "Potensi Kampung Nelayan Gedongmulyo Untuk Dikembangkan Sebagai Desa Wisata Bahari Di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah."

⁴⁵ Ningsih, Asvitasari, and Waluyo, "Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Ketupat Di Samarinda Melalui Redesain Masterplan Plaza."

d. Dukungan Pemerintah

Kebijakan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui investasi infrastruktur, promosi pariwisata, dan pengaturan regulasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri pariwisata suatu daerah⁴⁶.

e. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan promosi pariwisata dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta budaya⁴⁷.

Penyusunan strategi pengembangan potensi pariwisata desa harus mempertimbangkan keunikan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, pariwisata desa dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan serta menjaga keberagaman budaya dan alam⁴⁸.

4. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini dikenal memiliki kekayaan alam dan budaya yang masih sangat terjaga, seperti hamparan perbukitan hijau, sawah terasering, serta rumah adat Tongkonan yang menjadi ikon arsitektur khas Tana Toraja.

⁴⁶ Mandeh, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Nagari Mandeh 1-2."

⁴⁷ Siregar, S., & Pinem, "Potensi Objek Wisata Kabupaten Dairi."

⁴⁸ Jurnal, Mea, and Hayati, "MENCIPTAKAN HYPE ATAU BUZZ MELALUI INSTAGRAM TOURISM UNTUK MEMPROMOSIKAN DESTINASI WISATA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)."

Letak geografis desa yang berada di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan panorama alam yang menarik, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Selain itu, desa ini juga dikelilingi oleh beberapa objek wisata alam seperti sungai, air terjun, dan area pertanian organik, yang menambah daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, jumlah penduduk Lembang Bo'ne Buntu Sisong mencapai sekitar 800 jiwa. Struktur administratif desa ini terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 2 Rukun Tetangga (RT)

Masyarakat Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak, dengan kehidupan sosial yang masih kental dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal. Gotong royong, musyawarah desa, dan kegiatan adat rutin menjadi bagian dari aktivitas keseharian masyarakat setempat. Namun, meskipun memiliki potensi wisata yang tinggi, desa ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas yang sulit, serta belum adanya strategi komunikasi yang terencana dengan baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak luar. Oleh karena itu, desa ini menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti dalam konteks perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata, guna melihat sejauh mana komunikasi pembangunan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung potensi desa secara optimal.

5. Visi Misi Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Setiap Desa memiliki yang namanya Visi Misi karena setiap Desa pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, adapun visi dari Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong ini yaitu untuk “Mewujudkan pemerintahan Lembang Bo'ne Buntu Sisong yang transparan dan amanah.” Visi ini diwujudkan melalui sejumlah misi strategis, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan baik, nyaman, dan sopan; mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa; mengembangkan potensi lokal demi kesejahteraan bersama; meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan desa. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mendorong pembangunan desa berbasis kearifan budaya dan potensi alam.

6. Tugas pengelola Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang terletak di Tana Toraja, merupakan destinasi yang menyajikan kekayaan alam, budaya, dan tradisi lokal yang sangat kental. Sebagai desa wisata, pengelolaannya melibatkan berbagai pihak yang bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik sekaligus berkelanjutan.

Tugas pengelola sangat penting dalam mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk perencanaan, pelaksanaan program, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Dengan adanya struktur pengelola yang jelas, diharapkan desa wisata ini dapat berkembang secara optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan tetap melestarikan budaya serta alam yang ada.

Adapun tugas-tugas pengelola yang terlibat dalam operasional Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong:

a. Ketua Pengelola

Sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab atas kebijakan strategis dan keputusan-keputusan penting dalam pengelolaan desa wisata. Tugas utamanya adalah mengawasi seluruh kegiatan yang berjalan, mulai dari program wisata, kegiatan promosi, hingga keuangan. Ketua juga berperan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, lembaga pariwisata, dan mitra eksternal lainnya untuk mendukung perkembangan desa wisata ini.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua berfungsi sebagai pendamping dan pengganti Ketua Pengelola jika Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, Wakil Ketua juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai tim kerja, serta memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis.

c. Fasilitator

Fasilitator memiliki peran penting dalam menjembatani antara pengelola desa wisata dan masyarakat lokal. Mereka bertugas untuk memberikan pelatihan kepada warga desa agar dapat berperan aktif dalam sektor pariwisata, baik sebagai pemandu wisata, penyedia homestay, maupun penjual produk lokal. Fasilitator juga membantu dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung.

d. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa wisata. Tugas bendahara mencakup perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar operasional desa wisata tetap berjalan lancar.

e. Tim Promosi dan Pemasaran

Tim ini berfokus pada pengenalan dan promosi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong kepada wisatawan. Mereka bertugas untuk merancang strategi pemasaran, baik melalui media sosial, website, maupun kemitraan dengan agen perjalanan.

f. Tim Pelayanan Wisatawan

Tim pelayanan bertugas untuk memastikan kenyamanan pengunjung yang datang. Mereka memberikan informasi tentang destinasi wisata, mengatur akomodasi dan transportasi, serta menjaga kualitas pelayanan selama pengunjung berada di desa wisata. Tim ini juga bertanggung jawab dalam menangani kebutuhan logistik wisatawan, memastikan pengunjung merasa aman, nyaman, dan puas selama berada di desa.

g. Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tim SDM bertugas untuk mengembangkan keterampilan masyarakat dalam bidang pariwisata. Mereka menyelenggarakan pelatihan bagi warga desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam industri pariwisata, seperti pelatihan pemandu wisata, pengelolaan penginapan, dan pembuatan kerajinan tangan. Tim ini juga bekerja untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan budaya dan alam agar desa wisata dapat berkembang tanpa merusak potensi yang ada.

h. Tokoh Pimpinan Agama

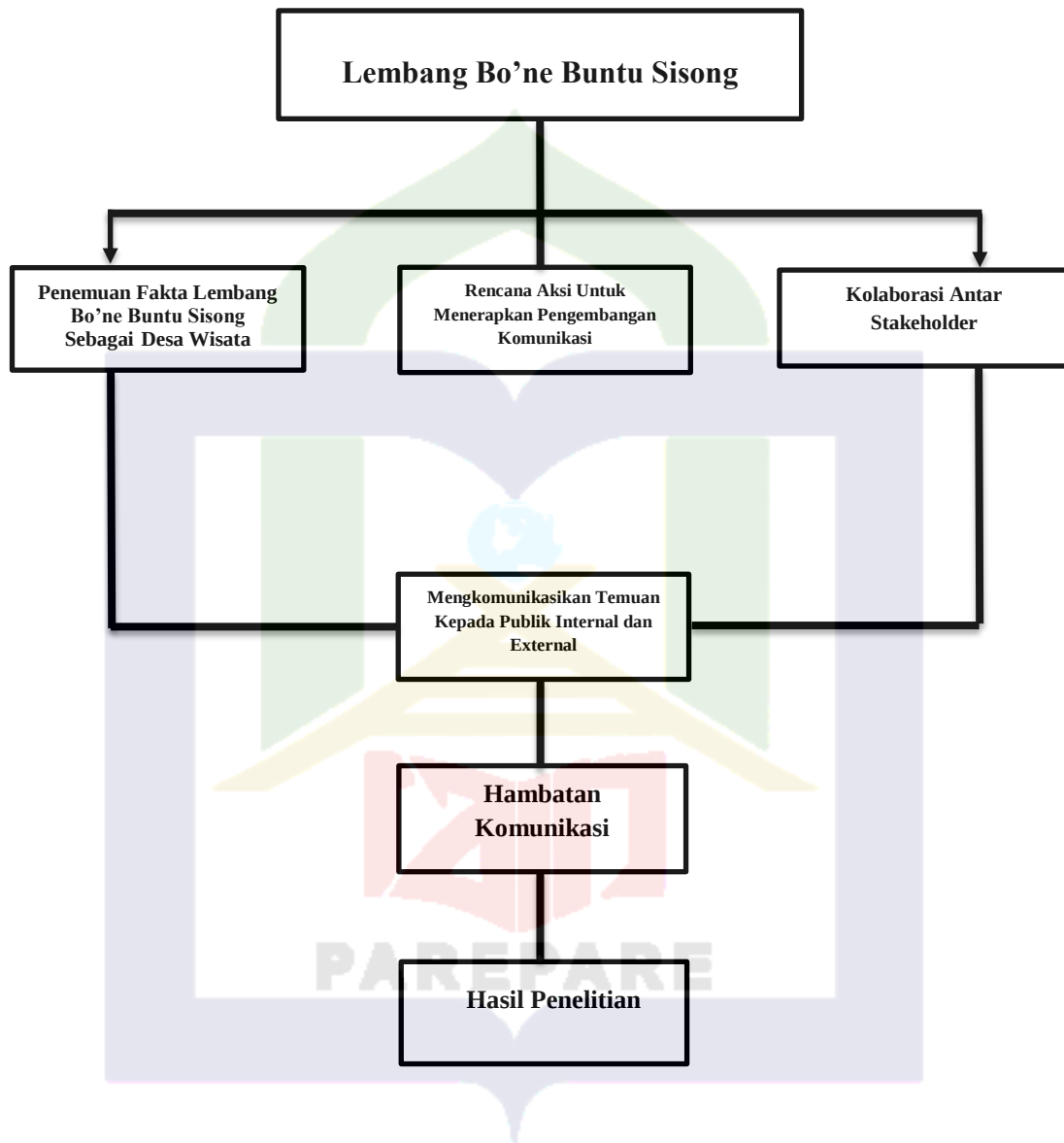
Tokoh Pimpinan Agama memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, tugas mereka adalah memberikan panduan moral dan etika kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan pariwisata yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Selain itu, tokoh agama juga dapat terlibat dalam upacara adat atau acara-acara budaya yang menjadi bagian dari daya tarik wisata di desa ini.

i. Pemerintah Desa

Pemerintah desa, melalui perangkat desa dan kepala desa, memiliki peran sebagai fasilitator utama dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata. Tugas mereka adalah memberikan dukungan administratif, legalitas, dan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata. Pemerintah desa juga berperan dalam mengawasi kegiatan pengelola, serta memastikan bahwa desa wisata berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



D. Kerangka Pikir



Gambar 3.1 Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai melalui teknik kuantitatif atau statistik. Kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dapat dibahas dalam penelitian kualitatif. Sementara sensus dapat digunakan untuk mengukur beberapa data, analisisnya tetap kualitatif (Shidiq & Choiri, 2019)⁴⁹.

Penelitian kualitatif memiliki fitur yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya. Pengamatan kuantitatif melibatkan menilai tingkat suatu karakteristik tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, manusia harus mengetahui karakteristiknya, jadi mereka mulai mencatat atau menghitung satu, dua, tiga, dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal ini, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa penelitian kuantitatif mencakup perhitungan persentase, rata-rata, dan teknik statistik lainnya. Dengan kata lain, setiap penelitian kuantitatif melibatkan perhitungan, angka, atau kuantitas. Kualitas, di sisi lain, menunjuk pada aspek alamiah yang bertentangan dengan kuantum atau jumlah tersebut. Karena itu, penelitian kualitatif tampaknya dianggap sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan⁵⁰. Maka, penelitian kualitatif dianggap cocok untuk penelitian dengan judul.

⁴⁹ Sidiq, Choiri, and Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. CETAKAN I . NATA KARYA, PONOROGO*.

⁵⁰ sudrajat and Moha, "Ragam Penelitian Kualitatif."

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama $\pm$ 45 hari lamanya, dimulai dari peneliti pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, dan penyusunan laporan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menyebarkan dan menganalisis perencanaan komunikasi yang diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tujuan utama dari perencanaan komunikasi, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi target audiens yang menjadi target komunikasi, baik itu masyarakat lokal, wisatawan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, strategi dan saluran komunikasi yang digunakan akan dianalisis untuk menilai efektivitasnya dalam menyampaikan pesan. Pesan-pesan kunci yang disampaikan dalam perencanaan komunikasi juga akan dikaji untuk memastikan relevansinya terhadap pengembangan desa wisata. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan juga akan diteliti, mengingat dampaknya terhadap keberhasilan program. Pada akhirnya, penelitian ini akan mengukur dampak dari perencanaan komunikasi yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Melalui fokus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas perencanaan komunikasi dalam mendukung pengembangan desa wisata di Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan temuan deskriptif dan konseptual yang dikumpulkan melalui analisis atau observasi terhadap sumber data. Menganalisis data kualitatif memungkinkan untuk mengeksplorasi ide. Data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Sugiyono (2020)⁵¹ sumber primer adalah sumber yang dapat secara langsung memberikan informasi penting. Dengan kata lain, sumber utama memberikan data penting tentang masalah penelitian melalui wawancara dan observasi informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan Data yang dikumpulkan oleh organisasi pengumpulan data dan didistribusikan kepada masyarakat umum disebut data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini, kami menggunakan literatur seperti buku referensi tentang Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, jurnal, dan studi sebelumnya.

⁵¹ sudrajat and Moha.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana terdapat dua pihak yang terlibat: wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban (Moelong, 2021)⁵². Teknik wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi mengenai Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ardiansyah. S. Ag	Koordinator Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS RI	Dipilih karena sebagai inisiator program pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan zakat. Ia memahami konteks awal perencanaan program dan komunikasi eksternal.
2	Tato Kalupang	Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong	Dipilih karena memiliki pengetahuan historis dan pengalaman saat perintisan awal potensi wisata di desa tersebut.
3	Tandi Rumambo	Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong	Merupakan pemegang kebijakan lokal yang berperan langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat desa.
4	Ahmad	Pengelola Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong Tahun 2021	Sebagai pelaksana langsung program wisata, ia mengetahui teknis pelaksanaan dan hambatan lapangan dalam komunikasi dan manajemen.

⁵² Moelong, M. R. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

5	Abdul Awal Dzikir	Pengelola Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong Tahun 2021	Memberikan perspektif tambahan sebagai rekan pengelola; memahami dinamika internal dan respon masyarakat terhadap program.
6	Zainal Abidin	Tokoh Masyarakat	Memiliki pengaruh sosial dan kultural di lingkungan sekitar desa. Dipilih karena kapasitasnya dalam memobilisasi dukungan sosial.
7	Nurmiyati Ka'to	Masyarakat	Dipilih untuk mewakili perspektif masyarakat umum terkait keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program desa wisata.
8	Suryati Embong Bulan	Masyarakat	Memberikan sudut pandang lain dari warga, terutama mengenai persepsi perempuan dalam pengembangan wisata berbasis lokal.
9	Muh. Ansar	Pemuda	Mewakili keterlibatan generasi muda desa. Memberikan informasi penting mengenai partisipasi dan peran pemuda dalam kegiatan wisata.

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2025

2. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung. Peneliti akan mengamati, mendengar, dan merasakan situasi yang terjadi di lapangan, mencatat semua gejala dan fenomena yang muncul untuk dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2022)⁵³. Observasi dilakukan secara aktif dan kontinu, dengan pengamatan terhadap subjek maupun objek penelitian. Peneliti telah melaksanakan observasi di Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Hal-hal yang diobservasi meliputi: (1) kondisi infrastruktur desa dan akses menuju lokasi wisata, (2) pola komunikasi antara pemerintah desa, BAZNAS, dan masyarakat, (3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata, (4)

⁵³ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

bentuk sosialisasi dan media komunikasi yang digunakan, serta (5) hambatan-hambatan yang muncul dalam proses komunikasi, seperti akses internet yang terbatas dan minimnya forum komunikasi bersama.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa arsip, buku, dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang berbentuk laporan atau keterangan yang mendukung penelitian. Sementara itu, Mardawani, menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencermati serta menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi akan dilakukan melalui foto peneliti bersama narasumber sebagai bukti yang telah dilakukan wawancara, yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji, kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Semua uji ini diperlukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah.

1. *Credibility*

Uji kredibilitas (*credibility*) dalam penelitian kualitatif merujuk pada proses untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dipercaya dan mencerminkan realitas yang sebenarnya. Uji ini bertujuan untuk

menilai kebenaran dari temuan penelitian, sehingga hasil yang disajikan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan.

a. Triangulasi Sumber

Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara dengan masyarakat lokal, observasi langsung di lokasi wisata, dan analisis dokumen resmi. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat menguji konsistensi temuan dan mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang pengembangan desa wisata. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa narasumber, yaitu pemerintah desa, pihak BAZNAS, dan masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat kesesuaian atau perbedaan pendapat antar pihak terkait pengembangan dan komunikasi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

b. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan survei. Dengan menggabungkan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara lebih mendalam dan memverifikasi hasil penelitian. Misalnya, wawancara dengan pengunjung dan observasi perilaku mereka di lokasi wisata dapat memberikan insight yang saling melengkapi.

c. Triangulasi Peneliti

Dalam pendekatan ini, lebih dari satu peneliti terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini membantu mengurangi bias individu dan memberikan perspektif yang lebih beragam terhadap data yang dikumpulkan. Misalnya, jika ada beberapa peneliti yang melakukan wawancara dengan informan yang sama, mereka dapat membandingkan hasilnya untuk meningkatkan keandalan temuan.

d. Triangulasi Teori

Menggunakan teori atau kerangka konseptual yang berbeda untuk menganalisis data yang sama juga merupakan bentuk triangulasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari berbagai sudut pandang teoretis dan memperkuat argumen mereka dengan dukungan dari berbagai perspektif.

e. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Peneliti meminta informan untuk meninjau dan mengonfirmasi hasil transkrip atau temuan penelitian guna memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar mencerminkan pengalaman mereka.

2. *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana temuan dari suatu studi dapat diterapkan atau relevan dalam konteks atau situasi lain. Berbeda dengan generalisasi dalam penelitian kuantitatif, yang berusaha untuk menarik

kesimpulan yang luas dari sampel yang terbatas, transferability lebih menekankan pada pemahaman konteks dan karakteristik spesifik dari penelitian yang dilakukan.

Peneliti dapat meningkatkan transferability dengan memberikan deskripsi yang mendetail tentang konteks, metode, dan proses pengumpulan data, sehingga pembaca atau peneliti lain dapat mengevaluasi apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dalam situasi serupa. Dalam konteks penelitian tentang *"Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong,"* transferability memungkinkan pemangku kepentingan di desa wisata lain untuk mengambil pelajaran dan menerapkan strategi yang berhasil sesuai dengan kondisi lokal mereka.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Untuk menguji dependability, audit keseluruhan penelitian dilakukan. Dengan cara auditor atau pembimbing yang independen mengawasi semua tindakan peneliti selama penelitian. Misalnya, proses di mana peneliti mulai menentukan masalah, bekerja di lapangan, memilih sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, dan terakhir membuat laporan tentang hasil penelitian.

4. Confirmability

Uji confirmability bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian bukan hanya mencerminkan pandangan atau bias peneliti, tetapi merupakan hasil

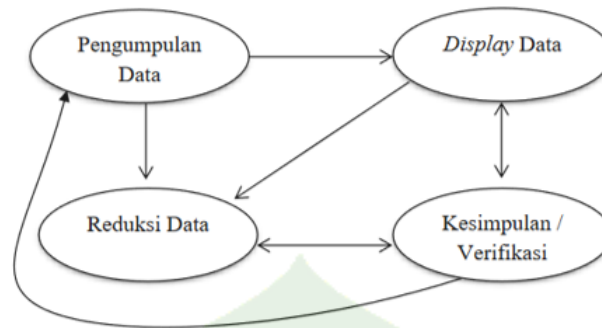
dari proses penelitian yang sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan langkah-langkah penelitian secara rinci, sehingga pihak lain dapat mengikuti jejak tersebut dan menilai apakah hasil yang diperoleh konsisten dengan data yang ada. Dalam konteks penelitian seperti "Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong," confirmability sangat penting untuk menunjukkan bahwa temuan yang dihasilkan adalah refleksi yang akurat dari realitas di lapangan dan bukan sekadar interpretasi subjektif dari peneliti.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan⁵⁴.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan hasil penelitian, data yang dikumpulkan dan dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif penelitian. Setelah penulis mengumpulkan data, langkah selanjutnya dalam penelitian adalah analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis melalui analisis isi. Untuk melakukan ini, peneliti menggunakan analisis matriks yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang menggambarkan analisis sebagai terdiri dari tiga proses simultan: pengurangan data, penampilan data, dan kesimpulan; gambar, dan verifikasi.

⁵⁴ Metodologi, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif."



Gambar 4.1 Analisis Matriks Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan merangkum informasi yang relevan dari data yang terkumpul, sehingga fokus pada informasi yang mendukung tujuan penelitian. Tahapan pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diproses dengan teknik analisis reduksi data. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan mempertegas, memperkecil ruang lingkup, dan membuat fokus pada data, serta menyingkirkan hal yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data diatur dan disusun secara sistematis. Proses ini mempermudah peneliti dalam menentukan langkah yang diambil sebagai bentuk pemecahan masalah, dengan data yang sudah digolongkan menjadi bagian-bagian yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Penyajian data yang sistematis membantu peneliti dan pembaca dalam memahami konteks dan makna dari informasi yang disajikan, serta memfasilitasi proses analisis lebih lanjut.

Penyajian data merupakan tahapan selanjutnya dalam memberikan gambaran atau interpretasi yang mudah dikenali dan dipahami baik bagi peneliti maupun orang lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan data yang sudah terstruktur dalam bentuk yang disesuaikan.

Berbagai data yang sudah digolongkan sebelumnya diinterpretasikan dengan matriks melalui penentuan kategori-kategori data tersebut. Matriks data ini berguna dalam penyampaian maksud data secara sistematis, serta sebagai acuan bagi penulis dalam memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh. Penyajian data yang baik tidak hanya mempermudah pemahaman, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang ada dan valid. Verifikasi ini penting untuk menjaga kredibilitas dan keandalan hasil penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Selama proses ini, peneliti juga dapat melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan sebagai dasar arah dan fokus kajian dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, baik dari segi strategi, pelibatan aktor, hingga kendala komunikasi yang dihadapi. Dengan menjadikan rumusan masalah sebagai acuan, data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di lapangan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh mengenai praktik dan tantangan dalam pengembangan desa wisata tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian oleh kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Tana Toraja. Dalam proses penelitian, rumusan masalah berfungsi sebagai pijakan untuk menggali data dari narasumber yang relevan, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, pengelola desa wisata, dan pihak eksternal seperti Baznas. Setiap temuan lapangan disesuaikan dengan fokus pada bagaimana perencanaan komunikasi dilakukan, sejauh mana kolaborasi dibangun, serta apa saja hambatan komunikasi yang muncul selama proses pengembangan desa wisata. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merancang strategi

komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pengembangan desa wisata ke depan.

Untuk menganalisis bagaimana perencanaan komunikasi yang telah dilakukan dalam pengembangan desa wisata oleh Lembang Bo'ne Buntu Sisong pada tahun 2021 pada saat ingin membuka Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong sebagai destinasi wisata, digunakan model perencanaan komunikasi dari Cutlip dan Center yang terdiri dari beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Fakta Permasalahan Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong pada tahun 2021 telah menjalankan program pengembangan desa wisata yang digagas bersama dengan mitra pendukung seperti BAZNAS RI melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif. Program tersebut sempat berjalan dan memperlihatkan hasil awal seperti pembangunan rumah produksi kopi serta pembukaan lokasi wisata berbasis alam dan budaya. Namun dalam perjalanannya, program pengembangan wisata tersebut tidak berlanjut secara kontinyu hingga pada akhirnya terhenti, baik dari segi aktivitas pengelolaan maupun komunikasi kepada masyarakat dan publik luar.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan tersebut, khususnya dari sudut pandang perencanaan komunikasi. Dengan menggunakan model perencanaan komunikasi dari Cutlip dan Center yang mencakup tahapan *fact finding*, *planning*, *communication*, dan *evaluation*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali bagaimana proses perencanaan komunikasi dirancang dan dijalankan dalam program desa wisata tersebut. Fokus

evaluasi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi yang dilakukan mampu menjembatani berbagai pihak yang terlibat serta pada titik mana dalam model perencanaan tersebut muncul hambatan, sehingga program yang telah dijalankan tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pelajaran penting mengenai strategi komunikasi yang tepat agar pengembangan desa wisata di masa mendatang dapat dilakukan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada awalnya, program pengembangan desa wisata ini muncul dari inisiatif program pemberdayaan ekonomi yang diusung oleh BAZNAS. Namun, sebelum program dimulai, BAZNAS menyadari pentingnya memahami kondisi sosial dan kesiapan masyarakat terlebih dahulu. Oleh karena itu, dilakukanlah asesmen awal di lapangan. Dalam proses ini, tim BAZNAS secara langsung datang ke lokasi desa, melakukan pengamatan sosial, serta membangun dialog dengan unsur-unsur penting desa seperti tokoh agama, kepala desa, jamaah masjid, dan kelompok pemuda.

BAZNAS tidak memaksakan program, melainkan mendahului dengan asesmen sosial, bertemu langsung dengan jamaah masjid, pemerintah desa, dan tokoh pemuda untuk mengetahui kesiapan sosial dan potensi wilayah. Komunikasi ini bersifat membangun kepercayaan (*trust building*), yang sangat penting dalam konteks desa berbasis adat seperti di Tana Toraja. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip internal publics, yaitu membangun komunikasi dari dalam komunitas terlebih dahulu sebelum menjangkau khalayak yang lebih luas.

Dalam proses pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat memiliki peran penting dalam

menjamin keberlangsungan program. Salah satu pihak eksternal yang memberikan kontribusi awal dalam bentuk pendanaan dan pelatihan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui program zakat produktif, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat desa. Namun, untuk memahami mengapa program tersebut tidak berlanjut secara optimal, diperlukan telaah mendalam pada tahap awal perencanaan komunikasi, yaitu Find the Facts, sesuai model yang dikembangkan oleh Cutlip dan Center.

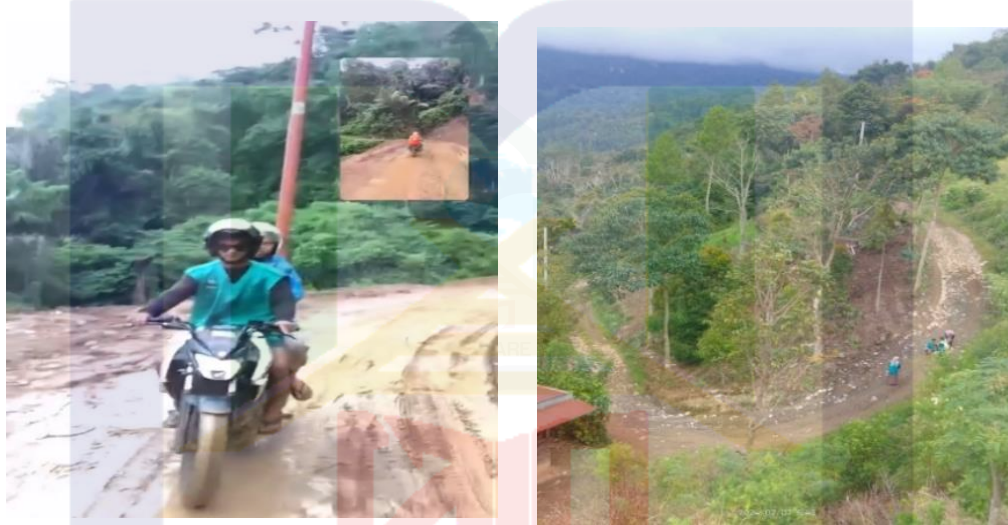
Tahap ini berfokus pada pengumpulan informasi awal terkait situasi komunikasi, hubungan antar *stakeholder*, serta kesiapan struktur lokal dalam menerima dan melanjutkan program pembangunan. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa salah satu kelemahan utama dalam perencanaan awal adalah tidak terbentuknya kepengurusan tetap yang mengelola desa wisata secara berkelanjutan.

Selain itu melihat kondisi, salah satu kendala utama yang juga ditemukan dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong adalah aksesibilitas menuju lokasi wisata yang belum memadai. Akses jalan yang menghubungkan pemukiman warga dengan titik utama destinasi wisata masih berupa jalan tanah dan bebatuan, yang pada musim hujan berubah menjadi licin dan berlumpur. Kondisi ini membuat kendaraan roda dua pun sulit melintas, apalagi kendaraan roda empat. Hambatan ini berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, karena perjalanan ke lokasi menjadi tidak nyaman dan berisiko, terutama bagi pengunjung luar daerah yang tidak terbiasa dengan medan ekstrem. Warga setempat pun sering kali harus berjalan kaki cukup jauh untuk

mencapai lokasi kegiatan, seperti rumah produksi kopi atau area swafoto, yang menjadi bagian dari atraksi wisata desa.

Berdasarkan hasil observasi langsung ke lokasi pada bulan juli 2024, ditemukan bahwa akses jalan menuju kawasan wisata utama di Bo'ne Buntu Sisong masih sempit dan sebagian belum diaspal, sehingga menyulitkan kendaraan roda empat untuk menjangkau area tersebut, terutama saat musim hujan.

Hal ini diperkuat oleh Dokumentasi Lokasi Wisata Bo'ne Buntu Sisong berikut ini:



Gambar 5.1 Mahasiswa menggunakan sepeda motor menembus kondisi seperti ini sangat umum terjadi saat musim hujan, serta jalur menanjak di sekitar desa wisata belum dilapisi aspal.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Kondisi seperti ini menyebabkan mobilitas warga dan wisatawan menjadi sangat terbatas, terutama ketika membawa perlengkapan promosi atau produk hasil desa seperti kopi. Hal ini tentu menjadi hambatan besar bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, akses infrastruktur menuju Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong menunjukkan bahwa jalur utama ke desa sebagian besar telah dibeton dengan panjang kurang lebih 1,5 kilometer. Namun, masih terdapat beberapa bagian jalan yang berupa jalur tanah berbatu dan belum sepenuhnya diratakan, khususnya di bagian akhir menuju lokasi wisata. Kondisi jalan yang menanjak dan relatif sempit juga menjadi karakteristik topografi wilayah ini. Selain itu, fasilitas fisik seperti lahan parkir dan papan penunjuk arah belum tersedia secara menyeluruh di titik-titik strategis. Keberadaan infrastruktur fisik ini berperan dalam mendukung kelancaran aktivitas wisata, khususnya terkait dengan mobilitas dan aksesibilitas pengunjung ke lokasi utama desa wisata.

Selain itu tahapan perencanaan komunikasi seharusnya mencakup identifikasi pemangku kepentingan utama serta pembentukan struktur kelembagaan sebagai penopang jangka panjang. Namun, dalam kasus ini, perhatian lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan pelatihan teknis, tanpa diiringi oleh strategi kelembagaan yang matang. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan manajemen setelah program selesai dan pihak eksternal menarik dukungannya.

Tanpa adanya pengelola tetap, masyarakat tidak memiliki rujukan yang jelas dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan, sehingga banyak potensi desa yang akhirnya tidak dikembangkan lebih lanjut. Tidak adanya strategi alih kelola atau pembentukan kader lokal sebagai pemimpin pengelolaan juga menjadi celah dalam keberlanjutan program.

Sebelum melakukan evaluasi terhadap perencanaan komunikasi, penting untuk terlebih dahulu memahami bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang melatarbelakangi perlunya evaluasi tersebut. Permasalahan ini menjadi dasar awal yang mengindikasikan bahwa perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa kendala teridentifikasi sejak awal pengembangan desa wisata. Misalnya, belum adanya kebijakan atau dokumen perencanaan resmi dari pemerintah desa terkait pengembangan wisata, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses awal perencanaan, serta minimnya pemahaman sebagian warga mengenai potensi wisata yang sedang dikembangkan. Selain itu, pengelolaan yang belum terstruktur dan tidak adanya tim pengelola tetap menjadi persoalan yang berulang setelah program berjalan. Beberapa masyarakat juga mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan dan arah pengembangan desa wisata tersebut. Semua temuan ini termasuk ke dalam tahap pertama dalam model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center, yaitu penemuan fakta (*fact finding*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi, persepsi, serta hambatan-hambatan yang ada sebelum menyusun strategi komunikasi lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan program perencanaan pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong pada tahun 2021, pengelolaan utama dijalankan secara langsung oleh pihak BAZNAS melalui tim pendamping Zakat Community Development (ZCD) yang ditempatkan di lokasi. Model pengelolaan ini menempatkan BAZNAS sebagai aktor sentral dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan wisata, mulai dari pembangunan rumah produksi kopi hingga pengaturan kegiatan promosi awal. Namun, dalam prosesnya tidak dibentuk struktur atau kelembagaan pengelola yang berbasis masyarakat setempat secara formal dan berkelanjutan. Masyarakat hanya terlibat sebagai peserta dampingan tanpa adanya alih peran atau transfer tanggung jawab secara sistematis. Ketika masa pendampingan oleh BAZNAS berakhir dan tim pendamping ditarik dari lokasi, tidak ada tim pengelola lokal yang siap melanjutkan program secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan aktivitas desa wisata tidak berlanjut dan mengalami stagnasi. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan

komunikasi belum secara optimal mempertimbangkan aspek penguatan kelembagaan lokal dalam keberlanjutan pengelolaan program.

Permasalahan ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu informan yang menjelaskan bahwa sejak awal, program memang tidak dirancang untuk membentuk kepengurusan tetap. Fokus utama diarahkan pada aspek teknis pembangunan dan pelatihan keterampilan, dengan harapan masyarakat dapat melanjutkan secara mandiri.

Namun, karena tidak ada struktur resmi yang dibentuk, tidak ada juga pihak yang secara formal mengambil alih tugas pengelolaan setelah program berakhir. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ardiansyah selaku fasilitator dari pihak Baznas bahwa :

“Memang pada waktu itu kami tidak membentuk kepengurusan tetap, karena sifat program ini hanya stimulus. Fokus utama kami adalah menyelesaikan pembangunan fisik dan pelatihan dasar terlebih dahulu, seperti rumah produksi dan pelatihan pengelolaan kopi. Kami berharap setelah itu masyarakat bisa melanjutkan secara mandiri. Namun, karena tidak ada struktur resmi yang dibentuk, tidak ada juga yang secara formal mengambil alih setelah program selesai. Akibatnya, kegiatan berhenti begitu saja.”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa, tahap *fact finding* dan *planning*, perencanaan belum mencakup pembentukan sistem kelembagaan yang akan bertugas mengelola keberlangsungan program. Padahal dalam model perencanaan komunikasi *Cutlip dan Center*, tahap perencanaan strategis merupakan fase yang sangat krusial untuk menetapkan struktur, publik sasaran, dan mekanisme implementasi program secara berkelanjutan. Keputusan untuk tidak membentuk kepengurusan tetap mengindikasikan bahwa aspek kelembagaan belum menjadi prioritas dalam perencanaan awal, sehingga menimbulkan kekosongan pengelolaan setelah intervensi eksternal berakhir.

⁵⁵ Ardiansyah Alimuddin/Baznas Tana Toraja wawancara pada tanggal 25 Maret 2025 di Tana Toraja

Selain itu, pendekatan ini juga didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat memiliki kesiapan untuk melanjutkan secara mandiri tanpa dukungan struktural atau legalitas organisasi. Kenyataannya, masyarakat lokal masih menghadapi keterbatasan dalam hal kepemimpinan, pengalaman manajerial, serta kapasitas pengorganisasian kegiatan wisata. Ketiadaan pelatihan dalam aspek kelembagaan atau penguatan organisasi semakin memperlemah kesiapan masyarakat untuk mengambil alih pengelolaan desa wisata.

Tidak adanya struktur formal juga berdampak langsung terhadap komunikasi internal desa. Tanpa kepengurusan, tidak tersedia saluran komunikasi yang jelas dalam hal pengambilan keputusan, koordinasi kegiatan, dan distribusi peran. Akibatnya, tidak hanya kegiatan wisata terhenti, tetapi juga potensi konflik sosial dapat meningkat karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara resmi dalam mengarahkan jalannya program.

Temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap perencanaan tidak hanya menyebabkan stagnasi program, tetapi juga mengganggu kesinambungan komunikasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis partisipatif, keberadaan struktur kelembagaan tidak dapat dianggap sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan mutlak. Tanpa adanya perencanaan yang menyeluruh, termasuk pembentukan kepengurusan tetap dan strategi keberlanjutan, maka program pembangunan akan cenderung bersifat temporer dan tidak berdampak jangka panjang.

Lebih jauh lagi, fakta ini menandakan bahwa tidak adanya struktur formal bukan hanya kekurangan administratif, tetapi hambatan utama dalam komunikasi internal dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Ketiadaan pengelola berdampak langsung terhadap terhentinya program dan kegagalan komunikasi lanjutan dengan pihak eksternal. Dalam situasi ini, komunikasi tidak berfungsi sebagai alat kolaborasi, melainkan berhenti pada proses transfer informasi teknis semata.

Oleh karena itu, pernyataan diatas menggambarkan dengan kuat bagaimana kurangnya perencanaan structural pengelola sejak tahap awal menyebabkan runtuhnya kesinambungan program. Fakta ini menjadi bahan evaluasi penting dalam pengembangan program desa wisata ke depan agar perencanaan komunikasi tidak hanya berbasis pada fisik dan teknis, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, sosial, dan keberlanjutan partisipatif.

Dalam konteks pembangunan desa wisata, perencanaan strategis menjadi semakin penting karena menyangkut pelibatan banyak aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal, potensi konflik, kesiapan sumber daya manusia, serta bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan. Tanpa perencanaan yang matang, program rawan mengalami stagnasi atau bahkan terhenti ketika dukungan eksternal berakhir.

Sayangnya, dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, proses perencanaan strategis belum dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Indikasi ini terlihat dari tidak adanya dokumen resmi yang mengatur arah pengembangan, belum terbentuknya struktur kelembagaan pengelola, serta minimnya keterlibatan pemangku kepentingan lokal seperti pemuda dan warga secara luas dalam penyusunan tujuan dan strategi program. Situasi ini menandakan bahwa desa belum memiliki roadmap atau peta jalan yang jelas untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai kekuatan ekonomi baru yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dari perspektif pemerintah, permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya perhatian dan prioritas terhadap pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang tercermin dari tidak dimasukkannya gagasan tersebut dalam visi, misi, maupun rencana pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan pengembangan desa wisata kurang mendapatkan dukungan kebijakan dan sumber daya memadai, sehingga potensi yang belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Keterlibatan pemerintah dalam menjadikan pengembangan wisata sebagai fokus utama juga berdampak pada kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku

kepentingan, sehingga upaya pengembangan menjadi kurang terarah dan berkelanjutan.

Hal serupa juga terlihat dari pernyataan Bapak Tandi Rumambo, Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang secara eksplisit menyatakan bahwa program desa wisata tidak menjadi prioritas utama dalam visi dan misi pemerintah desa:

“Yah yah mengenai tentang program desa wisata tentu yah tidak terlalu menjadi prioritas utama untuk visi misi kami tetapi ada disinggung disitu mengenai tentang pariwisata di Lembang Bo'ne Buntu Sisong karena mengingat di Bo'ne Buntu Sisong ini ada potensi alam yang begitu indah maka kami selipkan disitu sedikit meski tidak terlalu prioritas tentang pariwisata di Lembang Bo'ne Buntu Sisong.”⁵⁶

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa meskipun potensi alam dan budaya diakui, belum ada keseriusan kelembagaan dalam menjadikan desa wisata sebagai agenda strategis yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini menjadi titik lemah dalam tahap *Plan a Program dan Communicate the Story*. Informasi program tidak didesain sebagai narasi bersama yang mampu melibatkan masyarakat luas secara menyeluruh. Sosialisasi pun lebih bersifat terbatas dan hanya menyentuh tokoh tertentu. Akibatnya, ketika program berakhir, tidak ada struktur organisasi, sistem kerja, atau kepemimpinan lokal yang dapat mengambil alih peran pengelolaan wisata secara mandiri.

Pengembangan desa wisata tidak mendapat dukungan politik maupun kelembagaan yang kuat dari pemerintah desa. Ketika pariwisata hanya diselipkan secara terbatas dalam dokumen perencanaan tanpa dijadikan prioritas utama, maka hal ini berdampak pada tidak tersedianya alokasi anggaran, tidak terbentuknya tim kerja khusus, dan tidak adanya dokumen perencanaan operasional yang menjadi

⁵⁶ Tandi Rumambo/Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Tondok Lemo

acuan pengembangan. Ini menunjukkan bahwa komponen kebijakan dan legalitas lokal yang seharusnya menyokong program komunikasi pembangunan belum hadir secara memadai.

Menurut teori Cutlip dan Center, tahap perencanaan strategis menekankan pentingnya keterlibatan aktor kunci lokal, termasuk pemerintah desa, dalam menyusun program secara bersama dan menyeluruh. Ketika pemerintah desa tidak menunjukkan komitmen penuh, maka proses komunikasi pun menjadi tidak terarah, bersifat parsial, dan tidak memiliki kekuatan kelembagaan. Tanpa dukungan struktural dari pemerintah desa, sangat sulit untuk mengharapkan keberlanjutan program yang bergantung pada koordinasi lintas pihak, termasuk masyarakat dan lembaga eksternal seperti BAZNAS.

Situasi ini juga mencerminkan tidaknya program wisata sebagai agenda bersama masyarakat, melainkan sebagai proyek eksternal yang kurang dibumikan ke dalam kebutuhan dan perencanaan lokal. Dengan demikian, pembangunan desa wisata cenderung tidak berakar, karena tidak tertanam dalam sistem kelembagaan maupun dokumen formal seperti RPJMDes yang menjadi acuan perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

Situasi ini juga semakin diperparah oleh rendahnya partisipasi pemuda dalam proses pengembangan desa wisata. Ketidakhadiran program pembinaan, pelatihan, atau strategi komunikasi yang secara khusus menyasar generasi muda menjadi penyebab utama minimnya keterlibatan mereka. Dalam konteks komunikasi pembangunan, pemuda seharusnya diposisikan sebagai agen perubahan sekaligus motor penggerak dalam inovasi desa, termasuk dalam pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis lokal. Namun dalam kenyataannya,

tidak ada upaya konkret dari pemerintah desa untuk merangkul dan mengarahkan potensi pemuda dalam pengembangan wisata. Kelompok pemuda sejatinya memiliki peran penting sebagai *agent of change* dalam pembangunan desa, terlebih dalam konteks pariwisata yang menuntut inovasi, teknologi, dan promosi digital. Namun dalam kenyataannya, tidak ada pendekatan khusus dari pemerintah desa yang secara aktif mengarahkan atau memberdayakan pemuda untuk terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan program.

Salah satu persoalan yang muncul dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong adalah belum tumbuhnya kesadaran dari masyarakat, khususnya pemuda, untuk melihat kegiatan wisata sebagai bagian dari potensi ekonomi desa. Berdasarkan hasil temuan lapangan, sebagian pemuda belum mengaitkan keberadaan desa wisata dengan peluang peningkatan ekonomi atau penghidupan yang berkelanjutan. Aktivitas pariwisata masih dipandang sebagai kegiatan sesaat atau proyek tertentu yang sifatnya temporer, bukan sebagai sektor yang bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Minimnya pemahaman terhadap konsep wisata berbasis komunitas, serta keterbatasan akses informasi dan pelatihan, turut memengaruhi rendahnya keterlibatan pemuda dalam program ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kalangan muda sebagai salah satu elemen penting dalam keberlanjutan desa wisata.

Sebagaimana hal ini sejalan dengan pernyataan oleh saudara Ansar selaku salah satu pemuda bahwa :

“Kalau saya lihat, banyak teman-teman pemuda di sini lebih memilih merantau ke luar daerah karena merasa tidak ada kepastian atau prospek yang jelas kalau ikut mengurus desa wisata. Waktu itu, tidak ada ajakan langsung dari pihak desa atau pelatihan khusus untuk kami. Jadi ya akhirnya, tinggal sedikit yang mau bertahan dan aktif di sini. Itulah kenapa pengelolaannya seperti jalan di tempat, karena SDM-nya sangat kurang.”⁵⁷

Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mencerminkan lemahnya strategi komunikasi dan pemberdayaan dari pihak desa terhadap kelompok pemuda, yang sejatinya merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata lokal. Tidak adanya ajakan atau pelibatan langsung, serta absennya pelatihan atau pemberdayaan yang spesifik, mengindikasikan bahwa kelompok ini tidak teridentifikasi secara strategis sebagai target audience dalam tahapan *Plan a Program* maupun *Communicate the Story* dalam model perencanaan komunikasi *Cutlip dan Center*.

Tidak ada program komunikasi maupun pelatihan yang dirancang secara khusus untuk menjangkau dan melibatkan pemuda, baik sebagai pelaksana, mitra promosi, maupun kader pengelola wisata. Ketidakhadiran strategi pelibatan ini mengakibatkan terjadinya eksodus pemuda ke luar daerah, karena mereka tidak melihat prospek atau arah yang jelas untuk keterlibatan mereka di tingkat desa. Dalam pendekatan Cutlip dan Center, identifikasi publik sasaran merupakan aspek krusial dalam tahapan *Plan a Program*. Strategi komunikasi tidak hanya menyasar pemimpin formal atau tokoh adat, tetapi juga harus mencakup kelompok strategis yang memiliki potensi untuk memperkuat keberlanjutan program. Dalam hal ini, pemuda justru diabaikan, baik dari segi edukasi, pelatihan, maupun kepemimpinan.

Minimnya pelibatan pemuda tidak hanya mencerminkan lemahnya strategi komunikasi di tahap perencanaan, tetapi juga berdampak serius pada fase pelaksanaan dan evaluasi program. Tanpa adanya regenerasi pengelola lokal dan pelatihan

⁵⁷ Muh. Ansar/ Pemuda Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong wawancara pada tanggal 28 Maret 2025 di Tondok Lemo

berkelanjutan, komunikasi internal di desa menjadi timpang dan tidak terkoordinasi. Informasi seputar desa wisata tidak tersebar secara merata kepada semua elemen masyarakat, dan tidak ada forum atau mekanisme yang secara rutin menghimpun masukan maupun tindak lanjut dari kelompok pemuda atau komunitas desa lainnya. Hal ini membuat program kehilangan kekuatan sosialnya dan berujung pada stagnasi, karena tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan atau mengevaluasi keberhasilan program tersebut.

Ketiadaan sistem komunikasi pasca-program semakin diperparah dengan tidak adanya mekanisme evaluasi yang dirancang sejak awal. Pihak eksternal seperti BAZNAS menyatakan tidak menerima laporan perkembangan apa pun dari pihak desa, padahal mereka berharap adanya tindak lanjut untuk mempertimbangkan keberlanjutan dukungan. Ketiadaan pelaporan dan koordinasi ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah tidak berjalan secara berkelanjutan, dan evaluasi sebagai bagian penting dalam siklus program komunikasi terabaikan. Dalam komunikasi pembangunan yang partisipatif, keberhasilan tidak hanya diukur dari pelaksanaan awal, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem pelaporan, refleksi, dan perbaikan bersama antara pihak internal desa dan mitra eksternal.

Salah satu informan dari pihak eksternal menyampaikan bahwa setelah program awal dilaksanakan, tidak ada komunikasi atau laporan perkembangan dari pihak desa. Ketidakhadiran mekanisme umpan balik atau koordinasi berkala menjadi indikator bahwa tahap evaluasi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam perencanaan komunikasi tidak dirancang secara sistematis. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan dengan pernyataan oleh Bapak Ardiansyah selaku Fasilitator dari pihak Baznas bahwa:

“Nah, itu masalahnya. Setelah tahap awal selesai, kami tidak menerima laporan atau update apa pun. Tidak ada komunikasi lanjutan dari pihak desa. Padahal kami harap ada tindak lanjut, minimal laporan perkembangan atau koordinasi, supaya bisa kami evaluasi dan lanjutkan ke tahap berikutnya.”⁵⁸

⁵⁸ Ardiansyah Alimuddin/Baznas Tana Toraja wawancara pada tanggal 25 Maret 2025 di Tana Toraja

Dari hasil wawancara di atas jelas menunjukkan kegagalan dalam membangun saluran komunikasi dua arah yang berkelanjutan antara pelaksana program dan pemerintah desa. Tidak adanya pelaporan maupun koordinasi lanjutan membuat pihak eksternal kehilangan dasar untuk melakukan evaluasi, padahal evaluasi tersebut merupakan syarat utama untuk menentukan kelanjutan dukungan atau tahap program selanjutnya. Hal ini sekaligus mencerminkan lemahnya kesiapan pihak desa dalam memelihara hubungan strategis yang diperlukan untuk mendukung program jangka panjang.

Ketiadaan sistem pelaporan, forum evaluatif, maupun tindak lanjut pasca program menunjukkan bahwa komunikasi di tahap implementasi dan evaluasi tidak direncanakan secara matang sejak awal. Hal ini menyebabkan pihak eksternal kehilangan kepercayaan dan dasar objektif untuk mempertimbangkan keberlanjutan dukungan. Dengan kata lain, ketidakhadiran komunikasi bukan hanya menghambat evaluasi, tetapi juga menutup peluang program untuk berlanjut atau ditingkatkan.

Dalam kerangka model *Cutlip dan Center*, tahap evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas implementasi program serta menyesuaikan strategi komunikasi jika diperlukan. Tanpa komunikasi lanjutan, proses evaluasi menjadi terputus, sehingga pihak pendukung tidak memiliki dasar informasi untuk mempertimbangkan kelanjutan intervensi. Akibatnya, peluang untuk melanjutkan atau meningkatkan program menjadi hilang, dan potensi pengembangan lebih lanjut tidak dapat dimanfaatkan.

Ketiadaan sistem monitoring juga memperkuat asumsi bahwa program lebih bersifat reaktif daripada strategis. Artinya, kegiatan dilakukan tanpa disertai kerangka ukur keberhasilan yang jelas, tanpa indikator kinerja, dan tanpa mekanisme pengawasan atas pelaksanaan di lapangan. Dampaknya, pihak donor tidak memiliki dasar untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan terkait kelanjutan program.

Selain itu, ketiadaan komunikasi dari pihak desa juga memperlihatkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan. Padahal, dalam konteks pembangunan partisipatif, pelaporan dan komunikasi rutin adalah bentuk pertanggungjawaban sosial kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa itu, kepercayaan antara pemangku kepentingan dapat melemah dan berisiko menimbulkan kesan bahwa program tidak dikelola secara serius.

Wawancara diatas menegaskan pentingnya perencanaan komunikasi yang tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi juga mencakup perencanaan mekanisme evaluasi dan komunikasi pasca-program. Untuk program desa wisata agar berkelanjutan, komunikasi lintas-lembaga harus dijaga melalui pelaporan rutin, pertemuan koordinatif, dan sistem umpan balik yang terbuka. Hal ini penting tidak hanya untuk evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas komitmen bersama dalam membangun desa.

Selain tidak adanya komunikasi lanjutan dengan pihak eksternal, kelemahan juga terjadi dalam komunikasi internal di tingkat desa. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya pelibatan pemuda dalam kegiatan maupun evaluasi program. Pemuda sebagai kelompok yang seharusnya menjadi motor penggerak program wisata tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi, baik melalui pelatihan, kaderisasi, maupun pemberdayaan langsung. Lebih lanjut, fenomena kurangnya SDM karena migrasi pemuda ini merupakan akibat dari tidak adanya sistem kaderisasi atau regenerasi dalam struktur pengelolaan desa wisata. Perencanaan komunikasi yang efektif semestinya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memobilisasi partisipasi dan membangun kapasitas melalui pelatihan dan penguatan peran. Tanpa pelatihan yang memadai dan ajakan formal yang bersifat inklusif, pemuda tidak melihat posisi yang jelas bagi mereka dalam proses pembangunan desa, sehingga berujung pada apatisme dan eksodus ke luar daerah.

Kurangnya pelibatan pemuda dalam program desa wisata menunjukkan adanya celah dalam mencerminkan kegagalan dalam proses komunikasi pelibatan publik strategis, khususnya pemuda, pada tahap implementasi program. Pemerintah

desa tidak membangun komunikasi motivasional dan edukatif untuk memosisikan pemuda sebagai bagian dari sistem pengelolaan desa wisata. Akibatnya, banyak pemuda merasa tidak memiliki tempat dan arah yang jelas dalam program, dan memilih meninggalkan desa karena tidak melihat peluang pengembangan diri. Dalam konteks komunikasi pembangunan, ini adalah bentuk kegagalan menyampaikan pesan yang dapat menggerakkan partisipasi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program.

Kondisi ini menghambat pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan. Minimnya keterlibatan pemuda berdampak langsung pada stagnasi program, karena kelompok inilah yang seharusnya menjadi motor penggerak kegiatan kreatif, inovatif, dan promosi berbasis teknologi. Hal ini menjadi peringatan bahwa program pengembangan tidak dapat berhasil hanya dengan pembangunan fisik, tanpa membangun kapasitas dan motivasi sumber daya manusianya terutama dari generasi muda sebagai penggerak utama masa depan desa.

Setelah mengkaji peran pihak eksternal seperti BAZNAS, serta menelaah peran pemerintah desa dan partisipasi pemuda dalam pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong, perlu juga dicermati sejauh mana kesiapan dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Masyarakat merupakan elemen inti dalam pendekatan pembangunan partisipatif, karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan proses pembangunan.

Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata masih sangat terbatas. Minimnya sosialisasi yang menyeluruh dan kurangnya edukasi publik menyebabkan program desa wisata belum diterima secara luas sebagai agenda bersama yang strategis. Hal ini diperparah dengan tidak adanya proses komunikasi horizontal yang memadai antara pemerintah desa dan warga. Komunikasi yang berlangsung cenderung bersifat elitis hanya menysasar kelompok-kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat atau pengelola masjid tanpa menjangkau komunitas yang lebih luas.

Tingkat literasi wisata yang rendah dan keterbatasan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan sejak awal perencanaan komunikasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa dimensi ini justru belum dijadikan perhatian utama oleh pihak perencana program. Kegiatan sosialisasi bersifat parsial dan tidak berlangsung secara kontinu, yang mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan desa wisata yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kondisi ini juga tidak lepas dari latar belakang administratif wilayah Lembang Bo'ne Buntu Sisong itu sendiri, yang merupakan daerah hasil pemekaran baru dan masih dalam tahap penguatan kelembagaan. Pemerintah desa masih menghadapi berbagai tantangan dasar, baik dari segi manajemen, pengalaman birokrasi, maupun struktur pelayanan publik. Hal ini berimplikasi pada bagaimana pengembangan sektor wisata belum dapat menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Pentingnya memahami latar belakang ini ditegaskan pula oleh mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong, yang dalam wawancaranya menyampaikan sejumlah keterbatasan struktural dan sosial yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat dalam tahap-tahap awal pengembangan program desa wisata :

“Kendala pertama mungkin karena masyarakat belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan desa wisata. Sementara itu, kami juga merupakan lembang yang masih baru, baru saja mengalami pemekaran, jadi pengalaman kami masih sangat terbatas. Karena itu, kami banyak berkoordinasi dengan pihak luar untuk mencari arahan terkait pengembangannya. Namun karena program ini juga menjadi bagian dari visi dan misi Bapak Bupati, maka secara umum kebutuhan pengembangan ini cukup selaras.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa, keterbatasan pemahaman masyarakat bukan semata disebabkan oleh rendahnya minat, tetapi lebih kepada minimnya proses edukasi dan komunikasi publik yang dilakukan secara berjenjang

⁵⁹ Tato Kalupang/Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Mesjid Tondok Lemo.

dan sistematis. Pemerintah desa pada masa awal pemekaran menghadapi tantangan struktural dan pengalaman institusional yang minim, sehingga proses perencanaan komunikasi belum berjalan optimal. Koordinasi lebih banyak difokuskan ke pihak eksternal, tanpa dibarengi dengan mekanisme komunikasi internal yang kuat untuk membangun pemahaman kolektif di tingkat masyarakat akar rumput.

Dalam konteks model perencanaan komunikasi *Cutlip dan Center*, hal ini menunjukkan bahwa tahap *Fact Finding dan Plan a Program* belum sepenuhnya mengidentifikasi karakteristik dan kesiapan masyarakat sebagai khalayak utama. Proses penyusunan pesan dan strategi komunikasi tidak sepenuhnya disesuaikan dengan tingkat literasi, pengalaman, serta konteks sosial-budaya masyarakat lokal. Padahal, membangun komunikasi berbasis pemahaman lokal sangat penting terutama di wilayah adat seperti Tana Toraja.

Kondisi ini semakin memperjelas bahwa kelemahan perencanaan tidak hanya terletak pada aspek teknis dan kelembagaan, tetapi juga pada proses komunikasi sosial yang seharusnya memperkuat kapasitas pemahaman dan partisipasi masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat dalam memahami desa wisata menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap program, sehingga partisipasi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan program tidak terbentuk secara organik.

Lebih jauh lagi, ketika komunikasi hanya bersifat vertikal dan dilakukan dalam ruang terbatas seperti forum tokoh atau pertemuan formal antar pemerintah, maka sebagian besar masyarakat akan tertinggal dalam arus informasi. Inilah yang kemudian memperkuat temuan bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata tidak cukup hanya bertumpu pada intervensi eksternal atau dukungan kebijakan, tetapi juga sangat tergantung pada kualitas komunikasi internal, keterbukaan informasi, dan pendidikan publik tentang pariwisata sebagai sektor pembangunan strategis.

Dengan memperhatikan uraian tahapan perencanaan komunikasi di atas, dapat terlihat bahwa setiap langkah telah dilaksanakan secara bertahap, namun masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Beberapa upaya seperti pengumpulan data, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan komunikasi dengan

masyarakat memang telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis terhadap tahapan perencanaan komunikasi menggunakan model Cutlip dan Center, dapat disimpulkan bahwa setiap langkah perencanaan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak pada keberhasilan pengembangan desa wisata. Pada tahap *fact finding*, ditemukan bahwa riset dan pengumpulan data belum dilakukan secara menyeluruh sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman bersama terhadap potensi dan tantangan desa wisata. Tahap *planning* juga belum menunjukkan perumusan kebijakan yang terarah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada tahap *communication*, strategi penyampaian pesan belum berjalan secara sistematis, baik kepada publik internal maupun eksternal. Sedangkan tahap *evaluation* belum dilaksanakan secara rutin untuk menilai efektivitas komunikasi yang telah dilakukan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi belum dilakukan secara maksimal dan menjadi salah satu faktor yang menghambat terciptanya kolaborasi yang kuat dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

2. Kolaborasi Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Kolaborasi menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Mantan Kepala Desa, Baznas, dan masyarakat, diperoleh bahwa kolaborasi yang terjalin masih bersifat terbatas dan cenderung sektoral. Baznas sebagai pemicu awal telah membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat terlebih dahulu, namun tidak dilanjutkan dengan keterlibatan menyeluruh dari masyarakat umum dalam struktur kelembagaan yang jelas. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya atau ketidakjelasan kebijakan formal dari pemerintah desa yang seharusnya menjadi acuan bersama dalam pengembangan desa wisata.

Dalam konteks model perencanaan komunikasi *Cultip dan Center*, hal ini menunjukkan bahwa tahap *Establish a Policy, Plan a Program* belum dijalankan secara optimal. Tahap ini seharusnya berfungsi untuk merumuskan kebijakan yang terstruktur dan menyusun program-program strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Tanpa adanya kebijakan yang jelas, proses kolaborasi kehilangan arah dan tidak memiliki dasar rujukan yang kuat. Oleh karena itu, kelemahan dalam perumusan kebijakan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun sinergi antar pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pendukung seperti baznas, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak zainal Abidin selaku Tokoh Masyarakat ia menyatakan bahwa :

“Sejujurnya, sampai sekarang belum ada kerja sama yang jelas. Dulu waktu masih ada program dari Baznas, mereka datang langsung ke masyarakat, ada pelatihan dan pendampingan. Tapi setelah program itu selesai. Tidak ada lagi kegiatan yang dilanjutkan oleh pemerintah desa. Masyarakat bingung, karena tidak ada arahan atau kebijakan yang pasti.”
60

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan informasi bahwa kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah desa belum berjalan optimal. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya kebijakan tertulis atau arahan program yang berkelanjutan dari pemerintah desa pasca berakhirnya program dari basnas. Akar permasalahan dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong terletak pada tidaknya adanya kelanjutan program dan lemahnya komunikasi kelembagaan antara pihak eksternal dan pemerintah desa setelah program awal dari BAZNAS berakhir. Ketika pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS masih berlangsung, masyarakat mendapatkan arahan yang jelas, serta merasa dilibatkan dalam aktivitas pembangunan. Namun setelah program selesai, tidak ada bentuk keberlanjutan yang

⁶⁰ Zainal Abidin/Tokoh Masyarakat wawancara pada tanggal 27 Maret 2025 di Sisong

difasilitasi oleh pemerintah desa, baik dalam bentuk kebijakan, koordinasi, maupun kegiatan tindak lanjut.

Pernyataan informan menunjukkan bahwa tidak terbentuknya kerja sama formal antara masyarakat dan pemerintah desa menyebabkan masyarakat kehilangan arah dan kejelasan peran. Hal ini menandakan bahwa proses exit strategy dari program BAZNAS tidak disertai dengan penyerahan peran atau penguatan kelembagaan lokal. Dalam perspektif perencanaan komunikasi *Cutlip dan Center*, hal ini merupakan kegagalan pada tahapan *Evaluate the Program dan Communicate the Story*, di mana tidak ada strategi komunikasi yang dirancang untuk mengelola transisi peran dari pihak eksternal ke internal (pemerintah dan masyarakat desa).

Lebih jauh, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak mengambil alih kepemimpinan program setelah fasilitator dari luar selesai menjalankan perannya. Ketiadaan arahan atau kebijakan dari pemerintah lokal tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga melemahkan semangat partisipatif yang sempat tumbuh di kalangan masyarakat saat program masih berjalan. Ketiadaan kepastian tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kelanjutan program, serta memicu stagnasi dalam pengelolaan potensi wisata yang sebenarnya sudah mulai digerakkan.

Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa tidaknya adanya kesinambungan kebijakan, arahan, dan komunikasi dari pemerintah desa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengembangan desa wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong tidak berlanjut. Setelah program dari pihak eksternal berakhir, tidak ada mekanisme alih kelola yang jelas, baik dalam bentuk kebijakan, struktur pengelolaan, maupun forum koordinatif. Untuk itu, keberhasilan program serupa di masa depan sangat bergantung pada kemampuan lembaga desa dalam menyusun strategi komunikasi yang berkelanjutan, yang mencakup pelibatan masyarakat secara menyeluruh, penguatan kelembagaan lokal, serta kesinambungan program setelah intervensi pihak luar berakhir.

Namun demikian, hasil temuan juga menunjukkan bahwa upaya komunikasi sempat dilakukan pada tahap awal, meskipun belum merata dan tidak berkesinambungan. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa sosialisasi memang ada, namun tidak menjangkau seluruh lapisan warga secara adil. Hal ini menyebabkan partisipasi aktif belum terbangun secara optimal. Tokoh masyarakat dan kelompok pemuda memang menunjukkan peran penting pada fase inisiasi, namun minimnya pelatihan lanjutan serta ketiadaan struktur peran yang jelas menyebabkan keterlibatan mereka tidak berlanjut.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan dalam perencanaan kolaboratif lintas aktor, baik antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, maupun lembaga eksternal seperti BAZNAS. Padahal, dalam pendekatan komunikasi pembangunan, keberhasilan program bergantung pada sejauh mana setiap pemangku kepentingan dapat disatukan dalam satu kerangka komunikasi yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Tanpa hal tersebut, program yang telah dimulai berisiko mengalami stagnasi atau bahkan berhenti total karena kehilangan arah dan dukungan struktural.

"Yah itulah yang sedikit memberikan dorongan dan percepatan pengembangan wisata desa, karena itu yang tadi saya katakan dari semua komponen masyarakat itu sangat mendorong, terutama di pihak jamaah Tondok Lemo dan bupati. Jadi pembagiannya itu melalui ekowisata, mereka yang fasilitasi, sementara kita hanya mendorong dari luar. Kalau ada kendala, maka itulah yang diselesaikan secepat mungkin."⁶¹

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan informasi model kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong pada tahap awal memang menunjukkan antusiasme dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama seperti jamaah Tondok Lemo, serta dukungan dari pemerintah daerah. Kolaborasi ini memunculkan inisiatif melalui pendekatan

⁶¹ Tato Kalupang/Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Mesjid Tondok Lemo

ekowisata yang difasilitasi oleh pihak luar, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai pendorong dari luar struktur utama.

Namun, pernyataan informan juga mengindikasikan bahwa tidak ada struktur kelembagaan yang menetap atau sistem yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan program. Ketika fasilitator eksternal mengundurkan diri atau ketika terjadi kendala, tidak ada mekanisme internal yang kuat untuk melanjutkan atau mengembangkan inisiatif secara mandiri. Hal ini menimbulkan risiko stagnasi, bahkan penghentian total program, karena ketergantungan pada pihak luar tidak disertai dengan penguatan kapasitas internal masyarakat atau dukungan struktural yang memadai.

Dengan demikian, kolaborasi yang terbentuk cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek, belum mampu membentuk sistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu, kurangnya kesinambungan program juga terlihat dari lemahnya tindak lanjut terhadap pembentukan struktur kelembagaan sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Zainal Abidin selaku tokoh masyarakat ia menyatakan bahwa;

"Pernah, tapi hanya sekedar pembentukan pengurus saja, cuman sampai sekarang itu sudah berapa tahun tidak ada kelanjutan sosialisasinya."⁶²

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan informasi bahwa pernyataan ini memperkuat temuan bahwa kolaborasi masih belum memiliki dasar institusional yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk menyoroiti dinamika kolaborasi dari sudut pandang kelompok yang kerap kali kurang terwakili dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa, seperti kelompok perempuan. Menariknya,

⁶² Zainal Abidin/Toko Masyarakat wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Sisong

perspektif dari kelompok perempuan juga memperkuat temuan ini. Dalam wawancara bersama Ibu Nurmiyati Kato, selaku perwakilan kelompok perempuan/majelis taklim, beliau menjelaskan:

"Terkait masalah kolaborasi itu terbangun sejak pertama dibentuk, namun kelompok ini masih belum terlalu mahir dalam sistem pengelolaan, artinya masih membutuhkan bimbingan dalam mengelola desa wisata tersebut."⁶³

Hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa kolaborasi memang telah dimulai sejak awal, dan kelompok perempuan sempat dilibatkan dalam beberapa pertemuan. Namun, keterlibatan tersebut belum maksimal, karena pendampingan yang diberikan lebih difokuskan pada aspek pengelolaan kopi, bukan pada pengelolaan desa wisata secara menyeluruh. Akibatnya, kelompok perempuan belum mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang memadai untuk dapat berperan aktif dalam struktur pengelola wisata.

Tanpa forum atau wadah koordinasi yang aktif, banyak inisiatif awal berhenti pada tahap formalitas dan tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan desa wisata secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan kolaboratif lintas aktor, baik antara pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak eksternal lainnya.

Sebagai catatan penting, kolaborasi seharusnya tidak hanya berhenti pada tingkat inisiasi. Perlu adanya pembentukan forum desa wisata yang melibatkan semua elemen, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), petani, pengrajin, kelompok ibu-ibu, serta pihak swasta yang potensial menjadi mitra usaha. Ke

⁶³ Nurmiyati Kato/Kelompok Perempuan wawancara pada tanggal 27 Maret 2025 di Tondok Lemo

depan, strategi komunikasi kolaboratif ini harus disusun dalam peta jalan bersama agar setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

3. Hambatan Komunikasi Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong.

Hambatan komunikasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program desa wisata, minimnya sosialisasi, hingga komunikasi yang tidak merata di antara kelompok masyarakat.

Dalam konteks teori *Cutlip dan Center*, hambatan ini mencerminkan belum optimalnya penerapan tahap *Communicate the Story*, yaitu proses menyampaikan pesan, program, dan kebijakan secara efektif kepada seluruh audiens yang relevan. Penyampaian pesan kepada publik internal (masyarakat, perangkat desa, pengelola) belum dilakukan secara terstruktur, sehingga menyebabkan kebingungan peran, rendahnya partisipasi, dan lemahnya rasa memiliki terhadap program desa wisata. Sementara itu, komunikasi kepada publik eksternal (wisatawan, media, mitra) juga tidak berjalan maksimal karena tidak ada strategi promosi yang konsisten, baik secara daring maupun luring.

Internal publics mencakup masyarakat desa, aparat pemerintah desa, tokoh adat, dan pengelola awal wisata seperti kelompok penerima program Baznas. Mereka seharusnya menjadi pihak utama yang mengetahui arah dan perkembangan program desa wisata. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak dilibatkan secara aktif dalam diskusi atau pertemuan perencanaan, dan bahkan tidak mengetahui status kelanjutan desa wisata pasca-berakhirnya program Baznas. Kurangnya penyampaian pesan kepada publik internal ini menyebabkan

rendahnya partisipasi, kebingungan peran, serta minimnya rasa kepemilikan terhadap program wisata yang sedang atau pernah berjalan.

Di sisi lain, *external publics* mencakup wisatawan potensial, lembaga pendukung seperti Baznas, media lokal, dan instansi pariwisata. Komunikasi dengan mereka juga tidak berlangsung secara terstruktur. Tidak ada promosi digital atau media informasi resmi yang dapat memperkenalkan desa wisata ini kepada publik luar. Akibatnya, daya tarik dan potensi wisata tidak terpublikasikan secara luas, dan dukungan dari pihak luar menjadi lemah.

Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan komunikasi bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek strategis dan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah ketiga, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan potensi desa wisata terletak pada belum berjalannya komunikasi strategis yang sistematis sebagaimana digariskan dalam model perencanaan komunikasi *Cutlip dan Center*, khususnya pada tahap penyampaian informasi (*communicate the story*).

Hambatan-hambatan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis :

a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Salah satu hambatan paling nyata yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong adalah minimnya partisipasi aktif dari Masyarakat. Banyak warga desa yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapat informasi memadai mengenai pengembangan wisata, sehingga mereka merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya, sebagaimana yang dikatan

oleh Saudara Abdul Awal Dzikir selaku Pengelola Desa Wisata Tahun 2021 ia menyatakan bahwa:

“Selama pengelolaan wisata, hambatan yang dialami itu dari segi partisipasi masyarakat itu sangat jelas, yang pertama itu ada masyarakat yang kurang mendukung dari segi pengelolaan, artinya kurang mendukung dalam segi tidak memberikan ide atau mungkin tidak memberikan pendapat terkait perencanaan atau pengelolaan wisata tersebut.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat masih bersikap pasif terhadap inisiatif pengembangan desa wisata. Partisipasi yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal, seperti kurangnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, pandangan bahwa pengembangan wisata bukanlah prioritas utama, atau keengganan untuk terlibat karena belum melihat manfaat langsung dari program tersebut. Sikap "menunggu hasil" daripada "ikut membangun" masih dominan di kalangan warga, sehingga berdampak pada minimnya kontribusi dalam bentuk ide, tenaga, maupun keterlibatan dalam perencanaan.

Selain itu, rendahnya partisipasi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang turut memengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat. Hal yang sama diungkapkan oleh informan lainnya:

“Kalau soal partisipasi masyarakat yang masih rendah, menurut saya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, akses jalan menuju lokasi wisata memang masih kurang memadai, jadi pengunjung dari luar pun belum terlalu banyak yang datang. Kedua, dari sisi pengelolaan, inovasi dari pengurus yang sudah ditunjuk juga masih perlu ditingkatkan. Beberapa aset wisata yang ada sebenarnya punya potensi, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.”⁶⁵

⁶⁴ Abdul Awal Dzikir/Pengelola Desa Wisata Tahun 2021 wawancara pada tanggal 27 Maret 2025 di Tondok Lemo

⁶⁵ Ahmad/Pengelola Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong tahun 2021 wawancara pada tanggal 19 februari di depan Auditorium IAIN Parepare

Dari hasil wawancara di atas, penulis mendapatkan informasi bahwa sebagian masyarakat masih bersikap pasif terhadap inisiatif pengembangan desa wisata. Partisipasi yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, hal ini berkaitan dengan kurangnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, pandangan bahwa pengembangan wisata bukanlah prioritas utama, atau keengganan untuk terlibat karena belum melihat manfaat langsung dari program tersebut. Secara eksternal, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya inovasi pengelolaan juga turut berkontribusi. Sikap "menunggu hasil" daripada "ikut membangun" masih dominan di kalangan warga, sehingga berdampak pada minimnya kontribusi dalam bentuk ide, tenaga, maupun keterlibatan dalam perencanaan.

Dua pernyataan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam konteks ini, rendahnya partisipasi bukan sekadar akibat dari kurangnya informasi, melainkan lebih kepada kurangnya inisiatif dan kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri untuk mengambil peran dalam pembangunan desa.

b. Kesenjangan Komunikasi Antara Stakeholder Utama Dan Masyarakat

Beberapa program hanya disampaikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti jama'ah masjid, sementara masyarakat lain, termasuk pemuda, perempuan, dan petani, tidak mendapatkan akses informasi yang setara. Hal ini memunculkan kesan eksklusivitas dan menyebabkan rasa ketidakadilan.

"Pada dasarnya, pihak pengelola tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat menjadi bingung dan mempertanyakan apa sebenarnya objek wisata yang dimaksud. Akibatnya, program tersebut terbengkalai hingga saat ini."⁶⁶

⁶⁶ Ahmad/Pengelola Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong tahun 2021 wawancara pada tanggal 19 februari di depan Auditorium IAIN Parepare

Hasil wawancara yang dilakukan ini menggambarkan betapa minimnya komunikasi langsung dan terbuka antara pengelola dengan masyarakat. Ketiadaan forum komunikasi resmi atau pertemuan rutin membuat masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, serta tahapan pengembangan desa wisata. Akibatnya, terjadi kebingungan dan keraguan di kalangan warga tentang apa sebenarnya proyek wisata ini dan bagaimana peran mereka di dalamnya. Informasi yang tidak merata dan kurang transparan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan serta sikap apatis dari masyarakat, yang kemudian menghambat partisipasi aktif mereka.

Keterbukaan akses informasi menjadi faktor krusial dalam membangun pemahaman bersama dan rasa memiliki terhadap program pengembangan desa wisata. Jika komunikasi tidak dirancang secara inklusif dan partisipatif, maka upaya pemberdayaan masyarakat akan mengalami kendala, dan inisiatif pembangunan dapat mengalami stagnasi atau bahkan gagal. Oleh karena itu, penting bagi pengelola untuk membuka saluran komunikasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, media komunikasi lokal, maupun platform digital yang sesuai dengan karakteristik desa.

c. Ketidakteraturan Dalam Struktur Kepengurusan

Setelah dukungan dari BAZNAS berakhir, tidak ada pengganti pengelola yang jelas, sehingga arah komunikasi menjadi kabur. Kurangnya pelatihan lanjutan juga memperlemah kemampuan kelompok lokal dalam mengelola desa wisata secara mandiri. Selain itu, kurangnya pelatihan lanjutan menyebabkan kelompok lokal kesulitan dalam menjalankan pengelolaan secara mandiri. Situasi ini juga berdampak pada keterlibatan kelompok tani di wilayah tersebut. Selain itu, penting untuk menyoroti dinamika kolaborasi dari sudut pandang

kelompok yang kerap kali kurang terwakili dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa, seperti kelompok tani.

Dalam wawancara bersama Ibu Suryati Embong Bulan, selaku perwakilan kelompok tani, beliau menjelaskan:

“Keterlibatan kelompok tani dalam pengelolaan wisata tersebut sebetulnya tidak terlibat, karena memang pada dasarnya bahwa wisata ini dibangun khusus untuk pemberdayaan dan pengembangan umat muslim, karena sumber anggaran yang digunakan dalam program ini yaitu anggaran dari baznas Sementara kelompok tani yang ada di wilayah wisata itu, ada yang Islam, Kristen, Kibait, jadi untuk kelompok tani tidak terlalu berperan aktif di dalam.”⁶⁷

Hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan tidak merata, karena hanya menasar kelompok tertentu (jama'ah masjid). Walaupun ada rencana untuk melibatkan kelompok tani melalui sosialisasi dan pelatihan pemeliharaan kopi, pelaksanaan program tersebut belum terealisasi secara menyeluruh:

“Sempat diwacanakan bahwa kita akan diberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait pemeliharaan tanaman kopi sehingga hasil panen nanti itu bisa berkualitas dan akan diambil oleh Baznas untuk dikelola oleh kelompok yang terbentuk, yang dibentuk langsung oleh pengelola wisata tersebut dengan catatan beranggotakan dari jama'ah masjid.”⁶⁸

Hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa, hambatan komunikasi yang terjadi bukan hanya dalam hal penyampaian informasi, tetapi juga dalam hal partisipasi inklusif yang mencakup seluruh komponen masyarakat desa. Hambatan ini perlu diatasi dengan strategi komunikasi yang menyeluruh, transparan, dan partisipatif, agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencerminkan semangat kebersamaan warga.

⁶⁷ Suryati Embong Bulan/Kelompok Tani wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Tondok Lemo

⁶⁸ Suryati Embong Bulan/Kelompok Tani wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Tondok Lemo

d. Kurangnya Kepedulian terhadap Masa Depan Wisata

Hambatan lain yang juga muncul adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan desa wisata. Kurangnya kepedulian terhadap masa depan desa wisata muncul ketika tidak ada upaya berkelanjutan dari pihak-pihak terkait untuk menjaga dan mengembangkan program wisata secara jangka panjang. Hal ini terlihat dari minimnya evaluasi berkala, absennya strategi perencanaan lanjutan, serta lemahnya inisiatif untuk menggandeng generasi muda atau menciptakan inovasi dalam pengelolaan. Ketika perhatian hanya difokuskan pada fase awal pembangunan, tanpa tindak lanjut yang konsisten, maka keberlangsungan wisata menjadi terancam. Akibatnya, fasilitas terbengkalai, pengunjung menurun, dan potensi ekonomi yang semestinya terus tumbuh menjadi stagnan.

“Kemudian hambatan yang kedua itu dari masyarakat, kurangnya perhatian atau kepedulian dari masyarakat tentang masa depan dari pengelolaan wisata tersebut.”⁶⁹

Hasil wawancara yang dilakukan menegaskan bahwa kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh minimnya komunikasi tentang manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari keberadaan desa wisata. Ketika masyarakat tidak melihat dampak langsung atau belum memahami visi jangka panjang, maka keterlibatan mereka pun menjadi minim.

e. Tidak Tersedianya Ruang Komunikasi Terbuka

Tidak tersedianya ruang komunikasi terbuka mengacu pada ketiadaan forum atau wadah resmi yang memungkinkan masyarakat dan pihak pengelola

⁶⁹ Abdul Awal Dzikir/Pengelola Desa Wisata Tahun 2021 wawancara pada tanggal 27 Maret 2025 di Tondok Lemo

saling bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, serta berdiskusi secara langsung terkait pengembangan desa wisata. Ketika tidak ada pertemuan rutin, musyawarah, atau diskusi yang melibatkan semua pihak, maka proses komunikasi menjadi satu arah dan tertutup.

“Untuk mengatasi hambatan tentu pengelola perlu melakukan diskusi atau membuka ruang bagi masyarakat sekitar untuk bagaimana kita mencari solusi terkait hambatan yang terjadi selama ini. Tentu hadirnya wisata ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat karena kemungkinan mereka belum paham apa manfaat daripada hadirnya wisata di wilayah kita, jadi itu adalah acuan yang kenapa perlu dibukanya forum untuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat agar mendapatkan pendapat dari mereka.”

Dari hasil wawancara diatas penulis mendapatkan informasi bahwa hal ini menyebabkan banyak warga merasa tidak dilibatkan dan bingung akan arah pembangunan desa wisata. Ketertutupan informasi ini pada akhirnya melemahkan partisipasi masyarakat, menimbulkan kesenjangan pemahaman, serta memicu spekulasi atau bahkan konflik sosial.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, evaluasi terhadap perencanaan komunikasi pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong mengacu pada empat tahap model perencanaan komunikasi dari Cutlip dan Center: *fact finding*, *planning*, *communication*, dan *evaluation*. Pada tahap pertama, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi titik lemah dari proses perencanaan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa temuan utama sebagai bagian dari evaluasi:

a. Pengelolaan Tidak Dibangun Berbasis Masyarakat Lokal

Temuan pertama adalah tidak adanya pembentukan struktur pengelola berbasis masyarakat sejak awal program dijalankan. Pengelolaan desa wisata sepenuhnya dijalankan oleh pihak BAZNAS melalui program ZCD (Zakat Community Development) yang menempatkan pendamping di lokasi, tanpa diiringi dengan pembentukan kelembagaan lokal yang berkelanjutan. Setelah masa pendampingan selesai, tidak ada tim lokal yang siap mengambil alih program, yang menyebabkan kegiatan desa wisata berhenti. Pada tahap *fact finding*, hal ini mengindikasikan kurangnya identifikasi terhadap kebutuhan jangka panjang, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan lokal.

b. Rendahnya Kesadaran Pemuda terhadap Potensi Desa Wisata

Permasalahan lainnya adalah minimnya kesadaran dari kalangan pemuda terhadap potensi pengembangan desa wisata. Banyak pemuda lebih memilih merantau karena tidak melihat adanya peluang yang jelas dalam program ini. Tidak ada upaya komunikasi yang dirancang secara khusus untuk memosisikan pemuda sebagai bagian penting dari pengembangan desa. Hal ini menunjukkan kelemahan pada tahap *planning*, di mana strategi komunikasi belum menjangkau kelompok muda secara efektif, baik melalui pelibatan langsung, pelatihan, maupun ruang partisipatif lainnya.

c. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Program pengembangan desa wisata juga tidak melibatkan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Kegiatan dilakukan tanpa forum komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, atau ikut merancang arah program. Tidak adanya forum warga atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memperlihatkan bahwa komunikasi yang dibangun bersifat satu arah dan elitis. Pada tahap *communication*, hal ini mengindikasikan tidak berjalannya komunikasi partisipatif yang seharusnya menjadi dasar dalam pembangunan berbasis masyarakat.

d. Tidak Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Resmi Desa

Permasalahan terakhir yang ditemukan adalah tidak terintegrasinya pengembangan desa wisata ke dalam dokumen resmi desa seperti RPJMDes maupun visi dan misi lembang. Ketiadaan arah kebijakan yang eksplisit mengenai pengembangan wisata menyebabkan kegiatan ini tidak memiliki legitimasi struktural dalam sistem pembangunan desa. Dalam tahap *evaluation*, ketiadaan evaluasi terhadap arah dan keberlanjutan program menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi tidak memiliki landasan kebijakan yang kuat.

Dari keempat temuan di atas, perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong belum dirancang secara strategis dan partisipatif. Evaluasi menggunakan model Cutlip dan Center menunjukkan bahwa kelemahan sudah muncul sejak tahap pengumpulan fakta hingga implementasi dan evaluasi. Ketidakterlibatan masyarakat, lemahnya strategi komunikasi kepada pemuda, serta tidak adanya

arah kebijakan yang mendukung menjadikan program ini tidak berlanjut. Perencanaan komunikasi yang efektif seharusnya melibatkan semua elemen masyarakat sejak awal dan ditopang oleh struktur kelembagaan serta dokumen kebijakan yang mendukung.

2. Evaluasi Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Kolaborasi antar-pemangku kepentingan merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong belum berjalan secara fungsional dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan komunikasi pembangunan, ditemukan beberapa permasalahan yang menggambarkan lemahnya pola kemitraan dalam program tersebut.

a. Peran Pemerintah Desa Tidak Diperkuat dalam Kolaborasi Program

Selama pelaksanaan program, pihak BAZNAS berperan dominan melalui pendamping lapangan, sementara keterlibatan pemerintah desa tidak dirancang secara strategis. Pemerintah desa tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan maupun dalam pelatihan teknis atau pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan program berjalan tanpa penguatan kapasitas pemerintah desa sebagai mitra yang seharusnya memiliki peran sentral dalam keberlanjutan program. Pada tahap *fact finding* dan *planning* dalam model Cutlip & Center, ini mencerminkan tidak adanya pemetaan aktor lokal yang komprehensif

serta kurangnya upaya menyusun rencana kerja kolaboratif yang terstruktur.

b. Tidak Ada Mekanisme Koordinasi dan Forum Kolaboratif

Program pengembangan tidak disertai dengan pembentukan mekanisme koordinasi antar aktor, seperti tim kerja kolaboratif atau forum komunikasi bersama. Tidak ditemukan adanya kelompok kerja lintas lembaga yang menghubungkan pihak desa, masyarakat, pemuda, dan BAZNAS. Akibatnya, tidak terbentuk arus komunikasi dua arah yang memungkinkan pertukaran gagasan, umpan balik, atau penyelesaian masalah secara bersama. Pada tahap *communication*, ketiadaan ruang kolaboratif seperti ini menandakan bahwa strategi komunikasi tidak mengarahkan pada terciptanya sinergi antar-pihak.

c. Minimnya Keterlibatan Aktor Non-Desa Seperti Pemerintah Daerah atau Swasta

Selain kurangnya kolaborasi di tingkat desa, program juga tidak menjalin kerja sama lebih luas dengan aktor eksternal seperti pemerintah kabupaten, Dinas Pariwisata, atau pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program tidak membuka ruang kemitraan strategis yang dapat memperluas dukungan sumber daya maupun promosi. Evaluasi pada tahap *planning* dan *evaluation* memperlihatkan bahwa tidak dilakukan pemetaan potensi jejaring kolaborasi eksternal yang seharusnya dapat mendukung keberlanjutan program desa wisata.

kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong bersifat terbatas dan belum dibangun melalui sistem komunikasi strategis yang melibatkan seluruh aktor penting. Ketergantungan pada satu pihak (BAZNAS) tanpa penguatan kelembagaan lokal menyebabkan program tidak memiliki kesinambungan. Selain itu, tidak adanya forum koordinasi dan strategi komunikasi lintas aktor memperkuat kesenjangan peran antara pengelola program dan masyarakat. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, kolaborasi yang ideal seharusnya ditopang oleh pola komunikasi dua arah, koordinatif, dan saling menguatkan antar pemangku kepentingan.

3. Evaluasi Hambatan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam program pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada terhentinya keberlanjutan program. Hambatan-hambatan tersebut muncul pada berbagai tahapan komunikasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Tidak Terbangunnya Saluran Komunikasi Internal yang Berkelanjutan

Program desa wisata tidak disertai dengan pembentukan saluran komunikasi internal yang rutin dan jelas antara pihak pengelola (BAZNAS) dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Tidak ada media komunikasi desa seperti papan informasi, forum musyawarah

berkala, atau struktur penghubung yang mengatur alur informasi antar-pihak. Ketiadaan ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan program secara menyeluruh dan tidak dapat memberikan masukan secara langsung. Dalam konteks Cutlip & Center, hal ini menunjukkan hambatan pada tahap *communication*, di mana saluran penyampaian pesan tidak dirancang secara fungsional dan terbuka.

b. Rendahnya Keterjangkauan Komunikasi kepada Kelompok Strategis (Pemuda dan Perempuan)

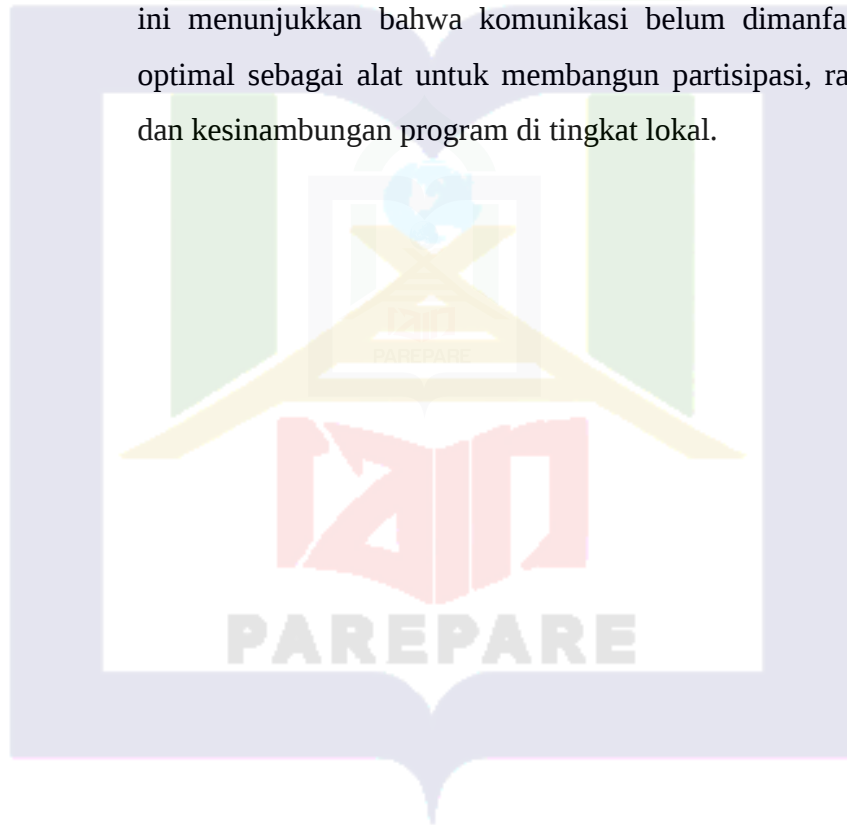
Program komunikasi tidak menjangkau kelompok strategis seperti pemuda dan perempuan secara khusus. Pesan-pesan program belum dikemas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Tidak ada pendekatan personal maupun kegiatan yang diarahkan secara khusus untuk membangun peran pemuda sebagai penggerak desa wisata. Akibatnya, kelompok-kelompok ini menjadi pasif dan tidak terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hambatan ini memperlihatkan kurangnya pemetaan audiens dalam tahap *planning*, sehingga strategi komunikasi tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

c. Tidak Tersedianya Ruang Umpan Balik dan Evaluasi Komunikasi

Selama pelaksanaan program, tidak ditemukan adanya mekanisme untuk menampung umpan balik dari masyarakat terhadap program yang dijalankan. Komunikasi yang bersifat satu arah menyebabkan masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, atau keluhan. Selain itu, tidak ada evaluasi komunikasi secara sistematis untuk menilai apakah pesan telah sampai dan dipahami oleh target audiens. Dalam model Cutlip & Center, hal ini merupakan kelemahan pada tahap *evaluation*, di mana proses

pengukuran efektivitas komunikasi dan perbaikan strategi tidak dilakukan secara berkala.

Hambatan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong terjadi pada berbagai level, mulai dari tidak terbentuknya saluran komunikasi internal, hingga tidak terjangkaunya pesan kepada kelompok sasaran utama. Ketiadaan forum dialog, lemahnya pemetaan audiens, dan absennya sistem evaluasi komunikasi menyebabkan proses komunikasi berjalan tidak efektif. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat untuk membangun partisipasi, rasa memiliki, dan kesinambungan program di tingkat lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model Cutlip & Center menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum memenuhi prinsip-prinsip strategis, partisipatif, dan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan pada empat tahap model *fact finding*, *planning*, *communication*, dan *evaluation*, mengungkapkan beberapa permasalahan pokok, antara lain:

1. Evaluasi Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne

Buntu Sisong

Perencanaan komunikasi dalam pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong belum dirancang secara strategis dan partisipatif. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada struktur pengelola lokal yang dibentuk secara resmi, tidak ada perencanaan bersama masyarakat, dan program wisata tidak terintegrasi dalam dokumen visi-misi maupun RPJMDes. Selain itu, komunikasi mengenai potensi dan arah pemberdayaan masyarakat tidak terstruktur, sehingga masyarakat kesulitan memahami manfaat jangka panjang program tersebut. Minimnya peran pemuda dan ketiadaan forum komunikasi juga menandakan lemahnya tahapan komunikasi kepada publik internal.

2. Kolaborasi Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu

Sisong

Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata sempat terbentuk, tetapi tidak berjalan seimbang. BAZNAS cenderung mendominasi jalannya program, seperti

pelatihan dan pembangunan fisik, tanpa pelibatan penuh unsur lain seperti pemerintah desa, pemuda, dan kelompok perempuan. Kolaborasi hanya terbatas pada pihak majelis taklim dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa membentuk forum koordinatif yang mengikat semua aktor. Akibatnya, ketika program BAZNAS berakhir, tidak ada keberlanjutan karena tidak adanya peta jalan atau struktur kerja sama yang kuat antara pihak internal dan eksternal.

3. Hambatan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Hambatan komunikasi muncul dari berbagai aspek. Dari sisi komunikator, tidak adanya kesepahaman visi antara kepala lembang, pengurus desa, dan masyarakat menyebabkan komunikasi berjalan tidak selaras. Tidak pernah ada duduk bersama antar pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam merancang arah pengembangan. Dari sisi pesan, informasi tidak disampaikan secara merata dan tidak ada saluran komunikasi resmi seperti papan pengumuman atau media sosial aktif. Hambatan juga terjadi pada media komunikasi: akses jalan yang sulit dan keterbatasan jaringan internet menyebabkan informasi tidak bisa tersebar luas secara digital. Pada masa pengembangan awal, infrastruktur komunikasi digital belum tersedia, sehingga pesan-pesan pembangunan hanya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi dengan baik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana mestinya, penulis menganggap ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan. Dengan melakukan kajian dan pemahaman yang mendalam, maka dengan hal ini penulis memberi saran-saran yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mendukung pengembangan desa wisata secara optimal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek yang sangat krusial. Pemerintah desa bersama mitra terkait perlu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan wisata, pengelolaan usaha, pemasaran digital, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Kegiatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan melibatkan pemuda sebagai motor penggerak perubahan. Dengan peningkatan kapasitas yang merata, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi desa wisata secara mandiri dan profesional.

2. Penguatan Rencana Kolektif dalam Pengembangan Desa Wisata

Untuk mendorong pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, diperlukan rencana kolektif yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Rencana ini sebaiknya menjadi bagian dari dokumen perencanaan resmi desa seperti RPJMDes atau RKPDes, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan secara terarah. Penyusunan rencana kolektif ini juga perlu didahului dengan pemetaan potensi dan permasalahan secara bersama, serta dibarengi pembentukan kelembagaan pengelola

yang fungsional. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi bagian dari visi jangka panjang yang tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan warga itu sendiri.

3. Penguatan Kolaborasi dengan Stakeholder

Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta perlu terus ditingkatkan guna mendukung pembangunan desa wisata yang berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif akan memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Adariyanto, Berto, Muh Ilham, and Ella Wargadinata. "Pengembangan Pariwisata Bono BPerbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau." *Jurnal Pemerintahan Daerah Indonesia* 12, no. 1 (2020): 63–74.
- Amalia Yunia Rahmawati. "PENGEMBANGAN POTENSI WISATA MELALUI DAYA TARIK WISATA (Studi Pada Kampoenng Vietnam Lampung) (Skripsi)," no. July (2020): 1–23.
- Andriani, Dewi, Rollis Juliansyah, Gede Nyoman Wiratanaya, Dhanik Puspita Sari, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Hesti Purwaningrum, Irma Kharisma Hatibie, etal. *PerancanganPariwisata*, 2022.
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/555439-perencanaan-pariwisata-7ca59f79.pdf>.
- Athik Hidayatul Ummah, Gustian Djuanda, Daelami Ahmad, Eka Sri Dana Afriza, Fadli Muhammad Athalarik, Fatmawati Moekahar, Ni Desak Made Santi Diwyarthi, Al Sukri, Opan Arifudin, Ni Putu Sinta Dewi, Sri Ayu Rayhaniah, I Wayan Adi Pratama, Daniel J I Kairupan. *Komunikasi Korporat*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2021.
- Barbu, Cristina, and Rachel Price-kreitz. "Ournal of Environmental Management and Tourism Biannually" III, no. 2 (2012): 56–72.
- Bramwell, Bill, James Higham, Bernard Lane, Graham Miller, Bill Bramwell, James Higham, Bernard Lane, and Graham Miller. "Twenty-Five Years of Sustainable Tourism and the Journal of Sustainable Tourism : Looking Back and Moving Forward" 9582 (2017).
<https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1251689>.
- Candra, Adi. "Perencanaan Komunikasi Humas Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Aplikasi Jemari Di Pekanbaru." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, no. 4649 (2022).
- Darmawan, Komang Krishna, and Putu Indah Rahmawati. "Pengembangan Potensi Wisata Alam Desa Cau Belayu." *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 5, no. 1 (2022): 49–56. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v5i1.35485>.
- Fadlina, Siti. "Pembangunan Destinasi Pariwisata Di Kelurahan Muara Enim Melalui Pendekatan Pengembangan Kampung Wisata." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 26, no.2(2021):178–92.
<http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/indexDOI:https://doi.org/10.30647/jip.v26i2>.
- Halil, Abdul, Hi Ibrahim, Syaiful Madjid, and Muhlis Hafel. "Tinjauan Kolaboratif

- Dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi Di Maluku Utara” 05, no. 02 (2024): 1–15.
- Hendrawati. “Pengembangan Multimedia Interaktif Pada Pembelajaran Menulis Cerita Rakyat Berbasis Literasi Siswa Kelas X SMA Swasta Al-Hidayah Medan.” *Jurnal Akuntansi* 11 (2017): 1–61.
- Hermawati, Adya, and Suhermin Suhermin. “Competitiveness Modeling and Swot Strategy Analysis for Tourism Industry in East Java.” *Jurnal Aplikasi Manajemen* 18, no. 4 (2020): 712–20. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.04.10>.
- Jurnal, Jimea, Ilmiah Mea, and Cucu Hayati. “MENCIPTAKAN HYPE ATAU BUZZ MELALUI INSTAGRAM TOURISM UNTUK MEMPROMOSIKAN DESTINASI WISATA JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)” 7, no. 2 (2023): 1525–37.
- Kandri, Kelurahan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Aprilyana Selin Marsela, and Atika Wijaya. “Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kehilangan Mata Pencahariannya” 9, no. 1 (2020): 848–56.
- Kurniawan, Ramdhan, Ginta Ginting, Maya Maria, Fauzy Rahman Kosasih, Rini Febrianti, and Mohamad Nasoha. “Pemetaan Rintisan Tata Kelola Wisata Menggunakan Drone Di Desa Kuripan.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8, no. 3 (2023): 756–65. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i3.480>.
- Mandeh, Nagari. “Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Nagari Mandeh 1-2” 20, no. November (2022). <https://doi.org/10.36275/mws>.
- Mauliddiyah, Nurul L. “Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Dan Potensi Ekonomi Lokal Di Kampung Waerebo, Nusa Tenggara Timur” 2, no. 9 (2021): 6.
- Mebri, Fredrick Hendrick, Ermaya Suradinata, and Kusworo Kusworo. “Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>.
- Metodologi, Lembar. “Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif,” 2002.
- Molle, Lucas P. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Pantai Natsepa Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.” *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 13, no. 1 (2020): 102–7. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.13.1.102-107>.
- Ningsih, Tutik Rahayu, Ayu Asvitasari, and Paramita Waluyo. “Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Ketupat Di Samarinda Melalui Redesain Masterplan Plaza” 7, no. 2 (2023).

- Nugroho, Raden Arief, Syaiful Ade Septemuryantoro, and Andi Hallang Lewa. "Krings," 1986, 800–808. <https://englishcoo.com/kesalahan-poster->.
- Prasetyo, Arif Rahman, and Tasman Hamami. "PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM" 8 (2020): 42–55.
- Pratama, Wisnu Yuda. "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa Di Kabupaten Probolinggo" 25, no. 2 (2023): 41–55.
- R Yuliani, M Abdi, F Pariwisata. "Strategi Pengembangan Penginapan Lokal (Homestay) Untuk Mendukung Desa Wisata Kampung Saribu Gonjong Kabupaten Lima Puluh Kota" XVI, no. 02 (2022): 72–77.
- Rahmatin, Leily. "Analisis Potensi Budaya Lokal Sebagai Atraksi Wisata Dusun Segunung." *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 3, no. 2 (2023): 30–40. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v3i2.79>.
- Ratwianingsih, Lely, Tri Mulyaningsi, and Johadi Johadi. "Analisis Potensi Dan Upaya Pengembangan Desa Wisata Alam Kepuhsari Manyaran Wonogiri." *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan* 3, no. 1 (2021): 25–30. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i1.1164>.
- Reza, Reza Kurniawan Abka, and I Made Murdana Murdana. "Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Alternatif Di Lombok Tengah." *Journal of Mandalika Review* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.55701/mandalika.v2i2.88>.
- Romadhan, Mohammad Insan, and Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana. "Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kampung Adat Segunung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2023): 222–34. <https://doi.org/10.35508/jikom.v12i2.8696>.
- Santoso, Sugeng, Ali Mustofa, Achmad Hafiz, Program Studi, Megister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, and Destinasi Wisata. "Potensi Kampung Nelayan Gedongmulyo Untuk Dikembangkan Sebagai Desa Wisata Bahari Di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah," n.d.
- Saputra, Hijrah, Ni Made Sukartini, Muhammad Zamal Nasution, Mochammad Reizza Al Ariyah, Yuhronur Efendi, and Abdur Rohman. "Analisis Swot Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Dan Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Desa Aik Berik Lombok Tengah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat - Teknologi Digital Indonesia* 2, no. 1 (2023): 19. <https://doi.org/10.26798/jpm.v2i1.778>.
- Sarmiadi, Yosi Suryani, and Elni Sumiarti. "Community Participation in Tourism

- Village Development in Tungkal Selatan Village, Pariaman Utara District, Pariaman City.” *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)* 544 (2021): 545–50. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.107>.
- Satato, Yuniarto Rahmad, Henry Yuliamir, and Eni Rahayu. “Potensi Wisata Kampung Pelangi Sebagai Daya Tarik Wisata.” *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1 (2019): 63–70. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/709>.
- Setiawan, Z, O Yendri, B A Kusuma, R P Ishak, Y Boari, N Paddiyatu, and T Kartika. *BUKU AJAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA*. PT. SonpediaPublishingIndonesia, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=XWngEAAAQBAJ>.
- Setyaningrum, Lintang Zeny, Andre N. Rahmanto, and Basuki Agus Suparno. “Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di ‘Nepal Van Java’ Dusun Butuh, Kabupaten Magelang.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 94–103. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.21>.
- SHELEMO, ASMAW ALEMAYEHU. “Strategi Pengembangan Wisata Kuliner Desa Wisata Kampung Lama Kabupaten Deli Serdang Berbasis Potensi Lokal.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CETAKAN I. NATA KARYA, PONOROGO., 2019.
- Siregar, S., & Pinem, M. “Potensi Objek Wisata Kabupaten Dairi,” no. 2 (2012).
- Suarja, I Ketut, Nyoman Indah Kusuma Dewi, and I Gusti Agung Bagus Mataram. “Tourism Marketing Strategy Based on Superior Potential of Pelaga Tourism Village, Petang District, Badung Regency.” *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)* 544 (2021): 210–14. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.040>.
- sudrajat, Dadang, and Iqbal Moha. “Ragam Penelitian Kualitatif,” 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jaxbf>.
- Susila, I Putu, I Ketut Sumantra, A.A Sudiana, and Ni Putu Pandawani. “Tourism Village Development Strategy Based on Local Resources in Ayunan Village, Abianseml District, Badung Regency.” *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 9, no. 2 (2021): 108–19. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i2.2021.3432>.
- Tafonao, Talizaro. “PERANAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MAHASISWA.” *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2018. <https://doi.org/10.32585/jkp.v2i2.113>.

- Tangkudung, Albert Wolter, and James Tangkudung. "Management Event of Sport Tourism (Dragon Boat Race) in Lake Toba North Sumatera." *Halaman Olahraga Nusantara (Jurnal Ilmu Keolahragaan)* 5, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.31851/hon.v5i1.6493>.
- Wula, Handrianus V.M. "Potensi Desa Wisata Rende." *Jurnal Poros Politik* 1, no. 1 (2019): 17–22. <https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.335>.



Wawancara

Ardiansyah Alimuddin, Baznas Tana Toraja, wawancara pada tanggal 25 maret 2025 di Tana Toraja.

Tandi Rumambo, Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong, wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Tondok Lemo.

Muh. Ansar, Pemuda Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong, wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Tondok Lemo.

Tato Kalupang, Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong, wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Mesjid Tondok Lemo.

Zainal Abidin, Tokoh Masyarakat, wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Sisong.

Nurmiyati Kato, Kelompok Perempuan, wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Tondok Lemo.

Abdul Awal Dzikir, Pengelola Desa Wisata tahun 2021, wawancara pada tanggal 27 maret 2025 di Tondok Lemo.

Ahmad, Pengelola Desa Wisata tahun 2021, wawancara pada tanggal 19 februari 2025 di depan Auditorium IAIN Parepare.

Suryati Embong Bulan, Kelompok Tani, wawancara pada tanggal 28 maret 2025 di Tondok Lemo.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-657/In.39/FUAD.03/PP.00 9/03/2024

Parepare, 15 Maret 2024

Hal : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Nurhakki, M.Si.

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : NUR AKHLIA FAJRIN
NIM : 2020203870233029
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN
DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr Wb



Dekan

Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-569/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2025

06 Pebruari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tana Toraja
di

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR AKHLIA FAJRIN
Tempat/Tgl. Lahir	: KARIANGO, 19 September 2003
NIM	: 2120203870233029
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: KARIANGO KEC. MATTIROBULU KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBAH BO'NE BUNTU SISONG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA

IZIN PENELITIAN

Nomor : 111/DPMPTSP/II/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada:

Nama : **Nur Akhlia Fajrin**
NIM : 2120203870233029
Tempat/ Tanggal Lahir : Kariango, 19 September 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kariango III, Kel. Pananrang, Kec. Mattiro Bulu
Tempat Meneliti : Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **"Penyusunan Skripsi"** dengan Judul:

"PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG"

Lamanya Penelitian : 6 Februari s/d 6 April 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Februari 2025

a.n. Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,



Yurinus Rangkelangi, SH, MH
NIP.196502111996101001





**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN MAKALE SELATAN
LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**

Alamat : Tondok Lemo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 50/LBBS/IV/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tandi Rumambo, S.pd.
Jabatan : Kepala Lembang
Alamat : Tondok Lemo, Lembang Bo'ne Buntu Sisong

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029
Tempat/Tanggal Lahir : Kariango, 19 September 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kariango III, Kel. Pananrang, Kec. Mattiro Bulu

Benar telah melaksanakan Penelitian di Lembang Bo'ne Buntu Sisong, Kecamatan Makale Selatan, pada tanggal 06 Februari s/d 06 April 2025 dengan Judul Penelitian **“PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bo'ne Buntu Sisong, 07 April 2025

Kepala Lembang



TANDI RUMAMBO, S.PD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NUR AKHLIA FAJRIN
NIM : 2120203870233029
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JUDUL : PERENCANAAN KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN DESA WISATA
LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut Model Perencanaan Komunikasi Berbasis Publik Relations Oleh Cultip dan Center (1974) yang memuat 1) *Find The Facts*, 2) *Establish A Policy Plan A Program*, 3) *Communicate The Story*, 4) *Internal Publics*, 5) *External Publics*. Model Perencanaan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan wawancara.

NO	FAKTA	PERENCANAAN DAN STRATEGI	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1.	Desa Bo'ne Buntu Sisong pernah dibuka sebagai desa wisata, namun operasionalnya terhenti setelah beberapa waktu	- Mengidentifikasi masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengembangan desa wisata - Lakukan monitoring dan evaluasi, serta komitmen terhadap keberlanjutan desa wisata - Pengkajian keadaan desa, yang dimana dapat menggunakan 3 alat kaji, yaitu kalender musim, peta sosial desa dan diagram kelembagaan.	- Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong - Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong - Baznas	3 Narasumber
2.	Belum ada kebijakan formal dari pemerintah desa terkait pengembangan desa wisata.	Melakukan Analisis situasi dan potensi, misalkan SWOT Analysis, untuk memahami kondisi internal dan eksternal	- Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong - Manta	5 narasumber

		desa dalam konteks pengembangan wisata. • Perlunya mengedukasi pemerintah desa serta melibatkan Masyarakat dalamnya, yang dimana informasi dan edukasi perlu disediakan misalkan tentang potensi manfaat ekonomi, sosial, budaya dari pengembangan desa wisata (tunjukkan contoh sukses dari desa lain). Selain itu juga perlu menyelenggarakan pertemuan, diskusi, atau workshop dengan Masyarakat untuk menjelaskan visi dan misi pengembangan desa wisata, serta manfaat yang bisa mereka peroleh. • Lakukan	n Kepala Desa Lemba ng Bo'ne Buntu Sisong • Masyarakat • Baznas • Pemuda	
--	--	---	---	--

		Kolaborasi aktif, tentunya mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah desa, Masyarakat, pihak swasta, dan pihak eksternal lainnya.		
3.	Permasalahan juga muncul dari dinamika antara publik eksternal dan internal, atau yang sering disebut sebagai stakeholder. Ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan.	• Membangun kepercayaan dari Masyarakat terhadap pemerintah desa sebelum memulai Pembangunan • Perlunya persiapan Desa, Dimana persiapan diawali dengan proses sosialisasi, sehingga Masyarakat diharapkan telah memahami maksud dan tujuan pemberdayaan serta Masyarakat memiliki kepercayaan, keterbukaan, dan suasana yang akrab antara Masyarakat dan pendamping	• Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong • Masyarakat • Baznas • Pemuda	4 Narasumber

		Melakukan Kolaborasi mewujudkan desa dengan konsep <i>Smart Village</i>, pemerintah desa membutuhkan bantuan beberapa elemen penting seperti organisasi sosial, petani, buruh, dan swasta.		
4.	Tidak terlihat adanya peningkatan signifikan pada objek wisata, terutama dari segi fasilitas yang disediakan	Identifikasi sumber dana, cari sumber pendanaan untuk peningkatan fasilitas, baik dari anggaran pemerintah, sponsor swasta, tentunya ini mampu meningkatkan lama menginap wisatawan. Sehingga, perekonomian Masyarakat mampu tumbuh dengan tidak mengandalkan sektor pertanian dan	- Kepala desa lemban g bo'ne buntu sisong - Pengelola desa wisata tahun 2021	2 Narasumber

		Perkebunan saja. • Sediakan wisata kuliner berupa rumah makan yang menyediakan makanan lokal khas Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong.		
5.	Desa Wisata Bo'ne Buntu Sisong mengalami kekosongan dalam hal pengelolaan dan kepemimpinan, yang berakibat pada tidak adanya pengurus atau pengelola yang bertanggung jawab untuk menjalankan program-program wisata.	• Melakukan pembentukan struktur organisasi yang efektif yang terdiri dari pembentukan badan pengelola, struktur yang jelas, partisipasi Masyarakat, dan pembagian tugas. • Lakukan wawancara mendalam dengan tokoh Masyarakat, mantan pengurus perwakilan pemuda, dan	• Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong • Masyarakat • Baznas • Pengelola Desa Wisata Tahun 2021 • Pemuda	5 Narasumber

		pihak terkait lainnya untuk memahami mengapa terjadi kekosongan kepemimpinan .		
6.	Ketika dukungan Baznas dihentikan, tidak ada upaya untuk memperpanjang kontrak atau mencari alternatif pengelola yang dapat melanjutkan program tersebut.	• Analisis mendalam penyebab kegagalan pengelolaan yang lalu, termasuk identifikasi kelemahan model bisnis, manajemen, dan keberlanjutan program. • Pengembangan model pengelolaan baru yang mandiri, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Sehingga meminimalisir ketergantungan pada satu	• Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong • Masyarakat • Pengelola Desa Wisata Tahun 2021 • Pemuda	4 Narasumber

		sumber pendanaan dan memastikan keberlanjutan program.		
--	--	--	--	--

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang perencanaan komunikasi pengembangan desa wisata lembang bo'ne buntu sisong. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian di analisis agar memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

NO	RUMUSAN MASALAH	NARASUMBER	PERTANYAAN
1.	Bagaimana Perencanaan Komunikasi Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?	Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong & Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong	1. Bagaimana awal mula Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
			2. Apakah Pembangunan Desa Wisata memang direncanakan dalam program kerja atau visi & misi saat bapak

			menjabat sebagai kepala desa?
			3. Apakah kendala yang muncul dalam proses perencan desa wisata?
			4. Bagaimana Komunikasi yang bapak bangun dalam membangun Perencanaan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong pada Masyarakat?
			5. Bagaimana Perencanaan dari segi pembagian peran dalam Pembangunan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
		Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)	1. Bagaimana Alur Program Pembangunan Desa Wisata yang Bapak Cetuskan Di

			Desa Ini?
			2. Bagaimana Pemerintah Desa Dalam Menerima dan Mendukung Pembangunan Desa Wisata Pada Saat Itu?
			3. Bagaimana Anda selaku pihak BAZNAS sebagai penyalur Dana merencanakan strategi komunikasi apa yang digunakan untuk memastikan bahwa program pengembangan desa wisata selaras dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat?
		Pemuda	1. Bagaimana Anda melihat peran pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?

			2. Apakah Anda merasa terlibat dalam kegiatan perencanaan atau pelaksanaan program desa wisata?"
2.	Bagaimana Kolaborasi Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?	• Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong • Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong	1. Bagaimana kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak (Pemerintah Desa, Swasta, dan Masyarakat) dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
			2. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata, dan Generasi Muda dalam mendukung pengembangan desa wisata sebelumnya?
			3. Dalam Pembangunan Desa Wisata sejauh mana pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan desa wisata?
		Badan Amal Zakat	1. Bagaimana Pihak

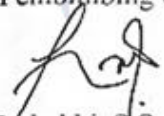
		Nasional (BAZNAS)	Baznas Selaku Pencetus Program Membangun Kolaborasi Dalam Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?
			2. Bagaimana Tokoh Masyarakat Dalam Merespon Program Yang Dibangun Ini?
			3. Apakah Ada Pelatihan Dalam Pengelolaan Desa Wisata ?
		Masyarakat	1. Apa Peran Anda Sebagai Warga Dalam Pembangunan Desa Wisata?
			2. Apakah Ada Sosialisasi Yang Dilakukan Pihak Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wisata?
			3. Bagaimana Anda Mengambil Peran Dalam Setiap Pelatihan Pengelolaan Yang Desa Wisata Adakan?
3.	Bagaimana	• Kepala Desa	1. Dalam

Hambatan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Lembang Bo'ne Buntu Sisong?	• Mantan Kepala Desa • Pengelola Desa Wisata tahun 2021 • Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS)	Merencanakan Dan Pengelolaan Desa Wisata Adakah Hambatan Yang Bapak Temui?
		2. Adakah Hambatan Atau Kendala Yang Ditemui Dalam Partisipasi Masyarakat
		3. Bagaimana Anda Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut?
		4. Apakah Ada Perbedaan Pendapat Atau Konflik Yang Muncul Akibat Kurangnya Komunikasi Yang Efektif Dalam Pengembangan Desa Wisata?
	• Masyarakat • Pemuda	1. Apakah ada konflik yang pernah anda alami dengan pihak lain terkait pengembangan desa wisata?
		2. Bagaimana konflik yang terjadi mempengaruhi hubungan antar anggota Masyarakat dalam

			konteks pengembangan desa?
			3. Apa dampak dari hambatan komunikasi terhadap partisipasi Masyarakat dalam program-program yang berkaitan dengan desa wisata?
			4. Apakah anda merasa ada kolaborasi yang baik antara berbagai pihak (pemerintah, Masyarakat, swasta) dalam pengembangan desa wisata? Jika tidak, apa penyebabnya?

Parepare, 20 Februari 2025

Mengetahui;
Pembimbing Utama


Nurhakki, S.Sos. M.Si
NIP. 197706162009122001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATO KALUPANG
Jabatan : MANTAN KEPALA DESA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG
Alamat : ANDULAN

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025


TATO KALUPANG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL ABIDIN
Jabatan : TOKO MASYARAKAT
Alamat : SISONG

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025



ZAINAL ABIDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL AWAL DZIKIR**
Jabatan : **PENGELOLA TAHUN 2021**
Alamat : **ANDULAN**

Menerangkan bahwa

Nama : **Nur Akhlia Fajrin**
NIM : **2120203870233029**

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025

ABDUL AWAL DZIKIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD
Jabatan : PENGELOLA DESA WISATA TAHUN 2021
Alamat : ANDULAH

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025


AHMAD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TANDI RUMAMBO
 Jabatan : KEPALA DESA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG
 Alamat : TONDOK LEMO

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin

NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**".

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025

TANDI RUMAMBO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYATI EMBONG BULAN

Jabatan : MASYARAKAT

Alamat : TONDOK LEMO

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin

NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025



SURYATI EMBONG BULAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmiyati Ka'to

Jabatan : Masyarakat

Alamat : Andulan

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin

NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025



N

Nurmiyati Ka'to

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardiansyah. S. Ag

Jabatan : Kordinator Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS RI

Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Akhlia Fajrin

NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO’NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025



A

Ardiansyah. S. Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Ansar
Jabatan : Pemuda
Alamat : Andulan

Menerangkan bahwa

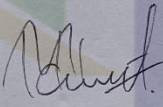
Nama : Nur Akhlia Fajrin
NIM : 2120203870233029

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “**PERENCANAAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN DESA WISATA LEMBANG BO'NE BUNTU SISONG**”.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan untuk sebagaimana semestinya.

Tana Toraja,

2025


Muh. Ansar

PAREPARE

Dokumentasi



Wawancara dengan Pengelola Desa Wisata Tahun 2021



Wawancara dengan Mantan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong



Wawancara Dengan Kepala Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong



Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat



Wawancara Dengan Salah Satu Perwakilan Majelis taglim



Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat



Wawancara Dengan Salah Satu Pemuda Desa Lembang Bo'ne Buntu Sisong

BIODATA PENULIS



NUR AKHLIA FAJRIN, lahir di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 September 2003. Penulis merupakan anak pertama 3 bersaudara, putri dari Bapak Ocid Rosdita Suhari dan Ibu St. Hadia, S.pd. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD 166 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mattiro Bulu dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMK Negeri 3 Pinrang pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama masa studi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Redline IAIN Parepare dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Komunikasi dan Penyiaran Islam. Melalui keaktifan dalam organisasi tersebut, penulis banyak mengasah kemampuan di bidang jurnalistik, kepemimpinan, serta manajemen kegiatan mahasiswa. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi/material. Penulis berhasil Menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Perencanaan Komunikasi dan Pengembangan Desa Wisata Lembang Bo’ne Buntu Sisong”**.